



PEMERINTAH KOTA MATARAM

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik. Karena itu Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, religius, berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun secara desentralisasi dan berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Pemerintah Kota Mataram, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram sebagai satuan kerja yang bertugas untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kota Mataram.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Sebagai entitas pelaporan, Pemerintah Kota Mataram mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah untuk menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi, yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik yaitu dengan cara:

1. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
2. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
3. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; dan
4. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D);
 13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
 15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 27 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
 17. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
 18. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
 19. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan /atau Retribusi Daerah;
 20. Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
 21. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram;
 22. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 57 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram;

23. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 58 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
2. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan;
3. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
4. Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
5. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas; dan
6. Bab VI Penutup.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Daerah

Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki posisi strategis sebagai salah satu pintu masuk utama yang berbatasan dengan Selat Lombok. Selat ini merupakan penghubung antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Kota Mataram terletak pada ujung sebelah barat dengan panjang garis pantai sejauh 9 km. Ada dua kecamatan yang berbatasan Langsung dengan pantai, yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.

Gambar 2.1
Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB



Luas wilayah Kota Mataram 61,30 Km² (6.130 Ha) atau 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km²) menjadikan Kota Mataram sebagai kota terkecil dari kabupaten/kota yang ada. Secara astronomis Kota Mataram terletak pada posisi antara 08o33' dan 08o38' Lintang Selatan dan antara 116o04' dan 116o10' Bujur Timur, dengan batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- c. Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- d. Bagian Barat : Selat Lombok.

2.2 Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Mataram baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2023. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi Tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun

menyelesaikan permasalahan dan isu- isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Mataram.

2.2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kategori yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa lainnya.

PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran, pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, perumahan dan perlengkapan rumah tangga, kesehatan dan pendidikan, transportasi dan komunikasi, restoran dan hotel serta lainnya.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) ScarCity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi, Mesin dan Peralatan, Kendaraan, Peralatan Lainnya, Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.

Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

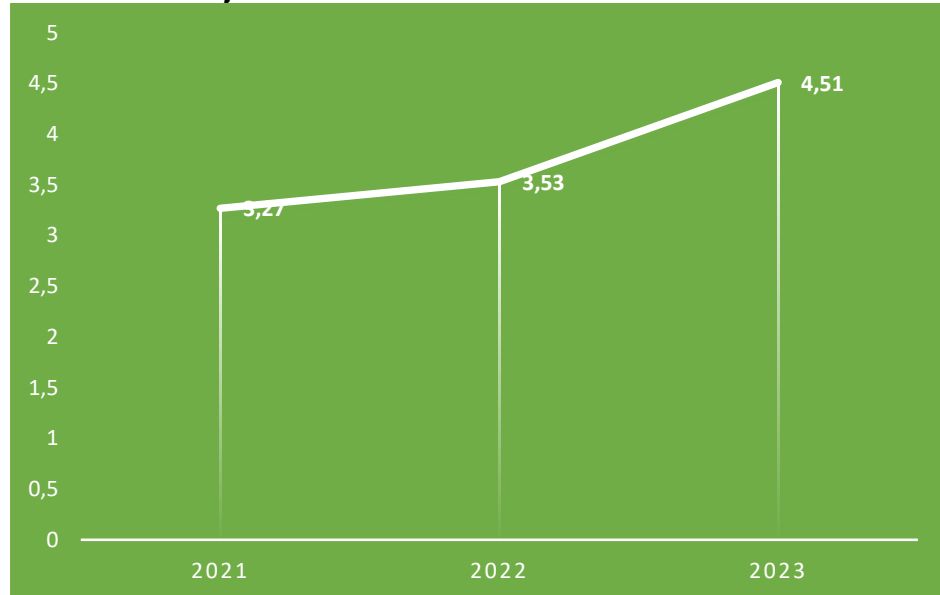
Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Pembentuk produk domestik regional bruto di Kota Mataram ada lima lapangan usaha yang paling berpengaruh. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menempati urutan pertama dengan andil sebesar 21,67 persen, disusul urutan kedua jasa keuangan dan asuransi dengan andil sebesar 10,55 persen. Urutan ketiga adalah konstruksi sebesar 9,37 persen, sedangkan urutan keempat dan kelima adalah jasa pendidikan dan industri pengolahan sebesar 9,01 persen dan 8,96 persen.

Laju pertumbuhan cenderung mengalami pertumbuhan sebesar 3,27 ditahun 2021 sedangkan laju pertumbuhan kembali positif yaitu pada tahun 2022 sebesar 3,53 dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,51. PDRB atas dasar harga berlaku meningkat dari tahun 2022 sebesar 7,55 persen pada tahun 2023. Hal ini terjadi juga pada

PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 4,51 persen.

Grafik 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Mataram, 2024.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Mataram didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB selain itu juga adanya peningkatan komponen PMTB dan perbaikan kinerja ekspor antar daerah. Dari sisi investasi (pembentukan modal tetap bruto) juga terjadi pertumbuhan yang lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kedudukan Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan pusat perdagangan tentu berdampak pada perkembangan perdagangan antardaerah dalam hal ini sisi ekspor.

Besarnya peranan berbagai kategori ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap kategori menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap kategori lapangan usaha.

Tabel 2.1. PDRB Kota Mataram Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2023

(dalam persentase)

Kategori industri		2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing.</i>	0,96	-0,02	2,27
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	1,19	0,11	2,37
3	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1,40	3,03	3,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	7,68	10,19	5,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	-0,47	-0,04	-0,33
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,35	0,55	8,46

Kategori industri		2021	2022	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2,47	5,23	8,53
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1,68	13,58	6,88
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,19	28,70	10,2
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	5,26	2,78	4,93
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	4,11	-2,98	-8,64
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,72	4,26	4,93
13	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,59	9,14	8,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,38	2,58	1,77
15	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,00	2,74	5,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	10,67	2,37	6,32
17	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,77	11,58	8,23
18	Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	3,27	3,53	4,51

Sumber: BPS Kota Mataram, 2024

2.2.2 PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkapita atau per-satu orang Penduduk.

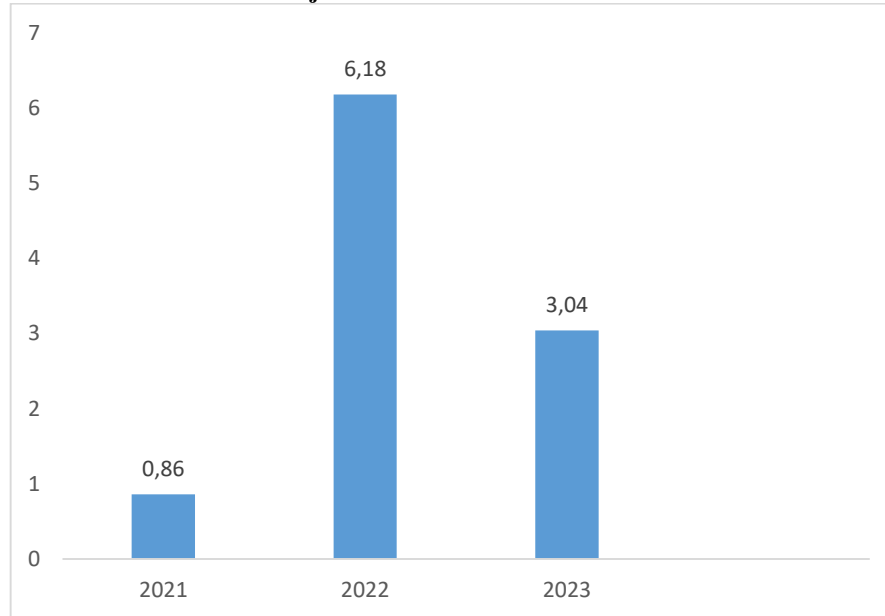
Pengeluaran per kapita per bulan paling banyak digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga pada tahun 2023 sebanyak Rp 475.314, menurun dibandingkan tahun 2022 yang besarnya Rp 431.018. Komoditas makanan dan minuman jadi menempati urutan kedua sebesar Rp 357,523 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang besarnya Rp 305.748. Aneka komoditas dan jasa menempati urutan ketiga sebesar Rp 240.007, meningkat dibandingkan tahun 2022. Tiga komoditas tersebut mengambil andil sebesar masing-masing 24,96 persen, 18,78 persen dan 12,60 persen. Pengeluaran per kapita terbesar adalah pengeluaran di atas Rp 1.500.000 yaitu sebesar 48,61 persen, kemudian antara Rp 1.000.000-1.499.999 sebesar 18,44 persen, kemudian yang ketiga Rp 750.000-999.999 sebesar 16,29 persen.

2.2.3 Inflasi

IHK menurut kelompok pengeluaran pada Desember tahun 2023 terbesar terdapat pada kelompok transportasi dengan indeks sebesar 130,67. Sementara itu, urutan kedua kelompok yang memiliki indeks terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 123,23 dengan inflasi sebesar 0,28. Laju inflasi menurut tahun kalender di Kota Mataram tahun 2023 terbesar terdapat pada bulan desember sebesar 3,04, sedangkan laju inflasi terendah yaitu terdapat pada bulan Januari sebesar 0,44. Laju inflasi tahunan menurun dari tahun 2022 sebesar 6,18 menjadi 3,04 pada tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, inflasi yoy pada tahun 2023 di Kota Mataram sudah melandai cukup signifikan, dan sudah on the track dengan target inflasi Kota Mataram yaitu sebesar $3\pm 1\%$, hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.2. Laju Inflasi Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Mataram, 2024.

2.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

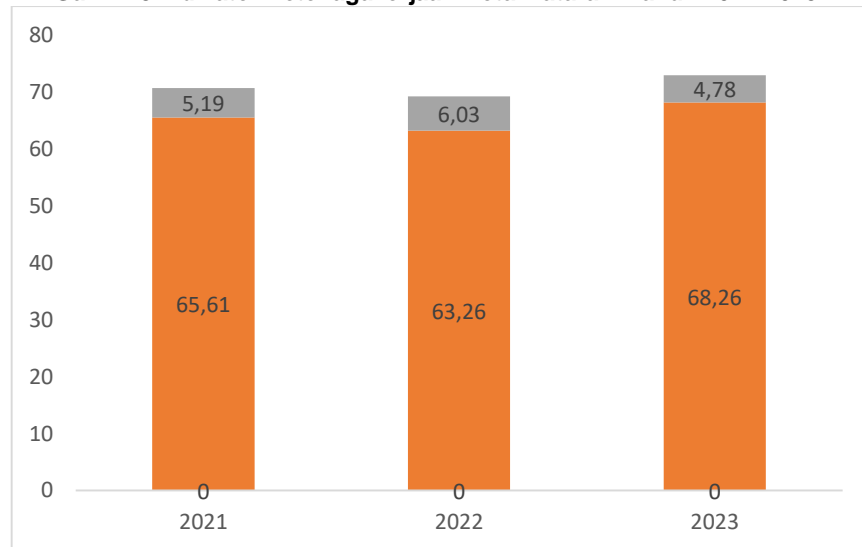
Berdasarkan data kependudukan yang bersumber dari BPS, jumlah penduduk Kota Mataram tahun 2023 tercatat sebanyak 441.147 jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 221.522 jiwa (50,22 persen) merupakan penduduk perempuan, sedangkan sisanya sebesar 219.62 (49,78 persen) merupakan penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2023 adalah sebesar 99,14 persen. Yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat 99,1 penduduk laki-laki.

Penduduk Kota Mataram belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Mataram. Penduduk banyak yang tinggal dan menetap di kecamatan Ampenan. Secara rata-rata, kepadatan penduduk Kota Mataram tercatat sebesar 7.197 jiwa setiap kilometer persegi, dan wilayah terpadat yaitu kecamatan Ampenan dengan tingkat kepadatan 9.652 orang setiap kilometer persegi.

Angkatan kerja pada tahun 2023 68,26 persen di antara penduduk usia kerja. Diantara angkatan kerja terdapat 95,22 persen penduduk yang bekerja. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang bekerja, perguruan tinggi paling banyak sebesar 97,80 persen sedangkan paling rendah sebanyak 93,02 persen berpendidikan sekolah menengah pertama.

Angkatan kerja pada tahun 2023 mencapai 68,26 persen di antara penduduk usia kerja. Diantara angkatan kerja terdapat 95,22 persen penduduk yang bekerja. Jika dilihat menurut tingkat pendidikan yang bekerja, perguruan tinggi paling banyak sebesar 97,80 persen sedangkan paling rendah sebanyak 93,02 persen berpendidikan sekolah menengah pertama.

Gafik 2.3 Indikator Ketenagakerjaan Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: Data diolah, BPS Kota Mataram, 2024

Seperti Gambaran akan kinerja aspek ketenagakerjaan di Kota Mataram salah satunya tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT. TPT merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kota Mataram selama tiga tahun terakhir ini atau periode tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi.

Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020. Keenam sensus penduduk sebelumnya dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional, yaitu mencatat setiap penduduk dari rumah ke rumah. Pertama kalinya dalam sejarah sensus penduduk di Indonesia, Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Hal ini dirancang dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan "SATU DATA KEPENDUDUKAN INDONESIA". SP2020 mencakup seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota TNI/POLRI beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Untuk tahun yang tidak dilaksanakan sensus penduduk, data kependudukan diperoleh dari hasil proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk merupakan suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi (migrasi internasional dan migrasi risen antar provinsi). Proyeksi penduduk interim 2020-2024 dihitung menggunakan data dasar penduduk hasil perapihan umur dari data Administrasi Kependudukan dan SP2020 dengan menggunakan asumsi Angka Kelahiran Total sejak tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Proyeksi Survei Penduduk antar Sensus (SUPAS) 2015-2045), Angka Kematian Bayi (AKB) meneruskan hasil Proyeksi SUPAS 2015-2045, dan pola migrasi 2020 sama dengan pola migrasi hasil SUPAS 2015. Dalam publikasi ini, data yang disajikan merupakan hasil SP2020 (September), dan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2024 (pertengahan tahun/Juni).

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15.

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan.

Distribusi penduduk adalah pola persebaran penduduk di suatu wilayah, baik berdasarkan batas-batas geografis maupun berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan. Komposisi penduduk adalah pola persebaran penduduk menurut karakteristiknya, contoh: penduduk menurut kelompok umur, penduduk menurut jenis kelamin. Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makan dari satu dapur. Yang dimaksud makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama-sama menjadi satu.

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga. Istilah migrasi seumur hidup disebut bila provinsi tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat lahirnya. Istilah migrasi risen disebut bila provinsi tempat tinggal seseorang pada saat pencacahan berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan). Jumlah jam kerja seluruhnya adalah jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan).

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam 1 digit. Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.

Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar adalah berusaha atas

risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.

Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/ kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.

Pekerja bebas adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga, ataupun di non pertanian atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Pekerja tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

2.2.5 **Garis Kemiskinan**

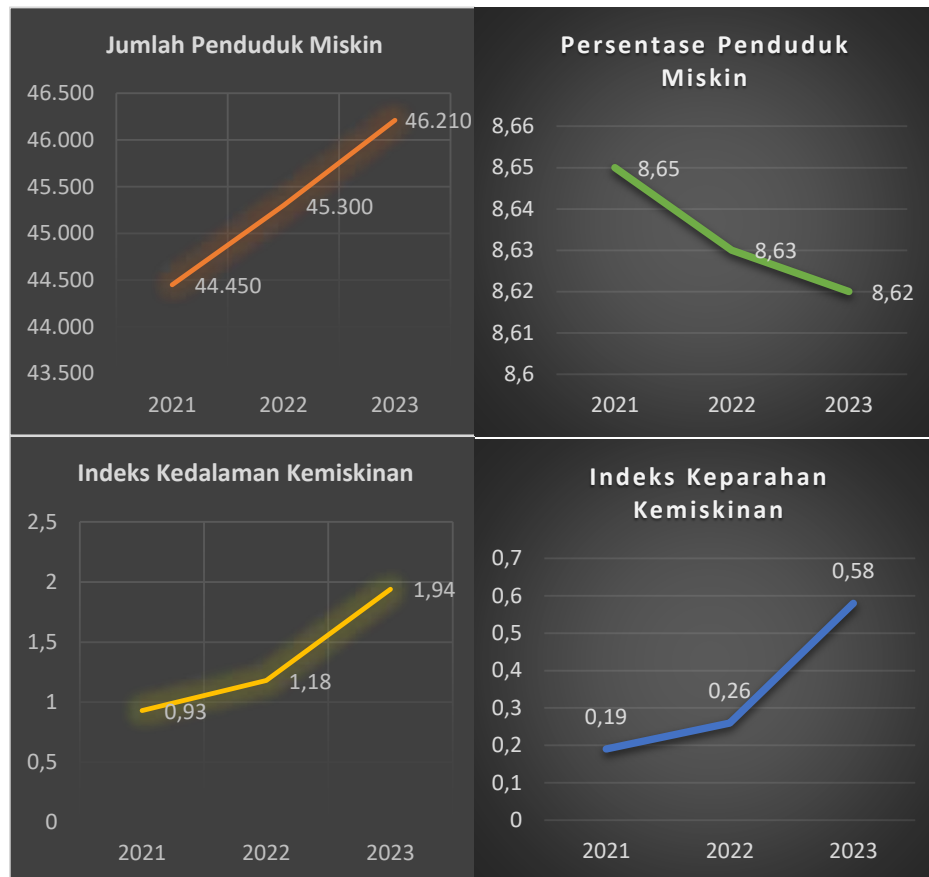
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Ukuran Kemiskinan a. Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK). b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. c. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adapun indikator-indikator yang berkaitan dengan Kemiskinan pada periode 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.4.
Capaian Indikator Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kota Mataram, 2024

Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada tahun 2023 sebesar 46,21 ribu orang, mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 yang sebesar 45,30 ribu orang.

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya terbatas persoalan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga tingkat kedalaman kemiskinan dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan semakin jauh jarak orang miskin terhadap garis kemiskinan. Jika semakin dalam atau semakin jauh dengan garis kemiskinan, semakin sulit untuk pengentasan kemiskinannya.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Harapan manusia untuk panjang umur adalah dengan hidup sehat. Oleh sebab itu banyak yang mengaitkan rendahnya angka kesakitan dengan tingginya angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk melihat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduknya. Indikator AHH ini menjadi penting dalam strategi pembangunan kesehatan pemerintah daerah karena indikator ini digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka harapan hidup yang rendah pada suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya seperti program kesehatan lingkungan, perbaikan gizi dan pengentasan kemiskinan.

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebanyak 46.210 jiwa, Kota Mataram berada di urutan ketujuh dari sepuluh Kabupaten/Kota.

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram berada di urutan pertama sebesar 81,15 diikuti di urutan kedua Kota Bima sebesar 78,24 dan ketiga Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 74,84.

2.3 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

2.3.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah. Ditinjau dari sisi Perubahan APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.3.2 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target Pendapatan

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalan dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan

lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan Pendapatan Daerah melalui penggalian dan optimalisasi potensi serta sosialisasi kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka Strategi Kebijakan Pendapatan Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

1. Penggalian potensi pendapatan daerah melalui updating database potensi;
2. Peningkatan partisipasi publik (swasta dan masyarakat) dalam pendapatan daerah melalui penerapan insentif dan disinsentif;
3. Peningkatan kualitas aparatur pendapatan daerah;
4. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, termasuk kualitas hubungan dan kerjasama antar OPD pengelola PAD;
5. Peningkatan keterlibatan seluruh stakeholder pendapatan daerah melalui koordinasi dan kemitraan;
6. Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah melalui sosialisasi dan penertiban.
7. Peningkatan target pendapatan daerah yang dilakukan secara terencana sesuai kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala dan potensi yang ada.
8. Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
9. Penguatan keberadaan kelembagaan Badan Pelayanan Perizinan.
10. Optimalisasi pelayanan perpajakan maupun retribusi melalui sinergi pelayanan antara lembaga teknis pengelola PAD.

2.4. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Kota Mataram Tahun 2023 dengan memperhatikan regulasi dan sinkronisasi dengan Kebijakan Nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada penerimaan daerah yang bersumber pada PAD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, maka PAD yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, meliputi:

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah Kota Mataram serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.



- Dalam rangka optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kota Mataram melakukan kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; dan
 - Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

c. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2.4.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus) dan Dana Insentif Daerah (DID).
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Pendapatan Transfer diharapkan terus meningkat melalui koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan pendapatan Bagi Hasil Pajak.

2.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada TA. 2023 sumber pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Hibah Air Minum dan Sanitasi.

2.5 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, target Pendapatan Daerah Kota Mataram diupayakan disusun berdasarkan perkiraan yang rasional dan terukur serta melihat perkembangan realisasi tahun sebelumnya khususnya pada Tahun 2023.

Pada APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.572.550.671.882,00 dan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan mengalami penambahan sebesar Rp91.288.647.209,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi sebesar Rp1.663.839.319.091,00.

2.6 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

2.6.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2023

Sejak tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari money follow function menjadi money follow programme dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas untuk mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2023.

Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja Daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada Perubahan KUA – PPAS yang didasarkan pada Perubahan RKPD.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan capaian kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Belanja diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup, serta pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas:

- 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

- b. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan di Kota Mataram meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Perdagangan; dan perindustrian.
- c. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
- d. Unsur Penunjang di Kota Mataram, meliputi: perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan
- e. Unsur Pengawas yaitu Inspektorat
- f. Unsur Kewilayahan yaitu Kecamatan
- g. Unsur Pemerintahan Umum, yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.7 Kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah juga dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi meliputi: Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal meliputi: Belanja Modal Tanah; Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; Belanja dan Belanja Modal Aset Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja Transfer meliputi: Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Kota Mataram dalam Perubahan RKPD Kota Mataram Tahun 2023 diperuntukkan, antara lain :

1. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester Pertama Tahun 2023, terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan perekonomian saat ini, dan keterbatasan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.
2. Perkembangan capaian kinerja daerah yang perlu disesuaikan dengan asumsi Perubahan KUA pada Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 antara lain:
 - a. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya arus digunakan dalam tahun berjalan;
 - b. Adanya perubahan pada beberapa pos pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023;
 - c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direpson dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi;
 - d. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian terhadap struktur Perubahan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 pada dokumen Perubahan RKPD Kota Mataram Tahun 2023.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.584.300.671.882,00 bertambah sebesar Rp180.889.583.972,00 atau mengalami kenaikan sebesar 11% sehingga menjadi Rp1.765.190.255.854,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Belanja Daerah TA. 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk TA. 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Anggaran belanja operasi pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.340.527.918.756,00 bertambah sebesar Rp109.152.052.585,00 atau mengalami kenaikan sebesar 8% sehingga menjadi Rp1.449.679.971.341,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp235.331.403.126,00 bertambah sebesar Rp72.882.657.387,00 atau mengalami kenaikan sebesar 31,% sehingga menjadi Rp308.214.060.513,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya dengan kriteria yaitu: (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal dibawah ini:

- a. Alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Penganggaran untuk masing-masing objek belanja modal berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

3. Belanja Tidak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp7.000.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.145.126.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 31% sehingga menjadi Rp4.854.874.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Belanja Tidak Terduga (BTT) dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat, serta amanat peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan semula sebesar Rp1.441.350.000,00 bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 atau mengalami

kenaikan sebesar 69,% sehingga menjadi Rp2.441.350.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.8 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada TA 2023 direncanakan melalui penganggaran Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). SiLPA direncanakan berdasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, SiLPA bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
5. Penghematan belanja;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
7. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Pada Perubahan KUA Tahun 2023, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan semula sebesar Rp14.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp89.600.936.763,00 atau mengalami kenaikan sebesar 640% sehingga menjadi Rp103.600.936.763,00.

2.9 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan pada RKPD TA. 2023 digunakan untuk penyertaan modal Daerah pada BUMD, yaitu PT. Air Minum Giri Menang Mataram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, penyertaan modal Daerah dilakukan dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD serta dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PT. AMGM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PT. AMGM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PT. AMGM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. AMGM dalam rangka memperbesar skala usaha PT. AMGM. Bagi PT. AMGM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PT. AMGM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PT. AMGM dimaksud.

Pada Perubahan KUA Tahun 2023, pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah pada Tahun Anggaran 2023 direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Indikator capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 secara makro dapat dilihat dari serapan anggaran pendapatan maupun belanja yang telah disediakan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah serta juga tingkat capaian Pendapatan Asli Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

3.1 Pencapaian Pendapatan Daerah

Pada tahun 2023, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.668.282.889.314,10 atau 100,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.663.839.319.091,00. Bila dibandingkan dengan nilai Pendapatan pada tahun sebelumnya terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari sisi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 11,20%. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp493.302.232.061,10, mengalami kenaikan sebesar 10,25% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp446.332.721.389,05. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.171.230.657.253,00 mengalami kenaikan sebesar 11,37% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1.051.642.188.665,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp3.750.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar 62,47% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp2.308.183.204,00. Gambaran lengkap dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
PENDAPATAN	1.668.282.889.314,10	1.500.283.093.258,05	11,20
PENDAPATAN ASLI DAERAH	493.302.232.061,10	446.332.721.389,05	10,25
Pendapatan Pajak Daerah	186.734.992.240,00	174.244.254.094,00	7,17
Pendapatan Retribusi Daerah	30.719.987.941,23	26.844.304.569,93	14,44
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.194.537.893,00	12.273.219.522,00	15,65
Lain-lain PAD yang Sah	261.652.713.986,87	232.970.943.203,12	12,31
PENDAPATAN TRANSFER	1.171.230.657.253,00	1.051.642.188.665,00	11,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.055.252.997.894,00	940.653.144.466,00	12,18
Dana Perimbangan	1.005.123.913.894,00	886.481.780.466,00	13,38
Dana Bagi Hasil (DBH)	143.574.223.905,00	145.384.257.364,00	(1,24)
Dana Alokasi Umum (DAU)	621.774.459.000,00	565.895.019.524,00	9,87
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	89.596.603.839,00	37.158.655.089,00	141,12
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	150.178.627.150,00	138.043.848.489,00	8,79
Dana Insentif Daerah (DID)	44.177.540.000,00	54.171.364.000,00	(18,45)
Insentif Fiskal	5.951.544.000,00	-	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	115.977.659.359,00	110.989.044.199,00	4,49
Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.820.864.001,00	35.836.593.901,50	(2,83)
Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	21.146.907.905,00	25.801.040.355,00	(18,04)
Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.335.432.893,00	22.271.925.332,00	45,18
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	58.151.495,00	43.574.220,00	33,45
Bagi Hasil Pajak Rokok	26.360.057.865,00	27.035.910.391,00	(2,50)
Bantuan Keuangan	1.256.245.200,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.750.000.000,00	2.308.183.204,00	62,47
Pendapatan Hibah	3.750.000.000,00	2.250.000.000,00	66,67
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	58.183.204,00	(100,00)

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Pendapatan daerah ini dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar kontribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2023 dan tahun 2022, dapat terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram, dimana Pendapatan Dana Transfer merupakan penyumbang terbesar disusul oleh Pendapatan Asli Daerah kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas Akuntansi per SKPD pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi

NO	SKPD	Pendapatan		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan	26.470.000.000,00	21.718.110.614,00	82,05
2	Rumah Sakit Umum Kota Mataram	180.000.000.000,00	231.002.133.297,07	128,33
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	200.000.000,00	58.360.000,00	29,18
4	Dinas Tenaga Kerja	200.000.000,00	160.591.660,00	80,30
5	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000.000,00	5.083.812.000,00	50,84
6	Dinas Perhubungan	13.000.000.000,00	9.931.655.987,00	76,40
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.040.000.000,00	1.158.104.300,00	111,36
8	Dinas Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	20.700.000,00	53.218.500,00	257,09
9	Dinas Penanaman Modal dan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	4.900.000.000,00	3.369.604.357,00	68,77
10	Dinas Pertanian	270.000.000,00	516.011.885,00	191,12
11	Dinas Perdagangan	10.055.000.000,00	7.047.075.253,23	70,09
12	Badan Keuangan Daerah	1.417.683.619.091,00	1.388.184.211.460,80	97,92
JUMLAH		1.663.839.319.091,00	1.668.282.889.314,10	100,27

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Permasalahan yang muncul dari sisi Pendapatan Retribusi daerah yang tidak mencapai target dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Permasalahan yang Muncul dari Sisi Pendapatan Retribusi Tahun 2023

SKPD	Jenis Retribusi	Permasalahan
DISHUB	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Terlalu tingginya target yang diberikan sementara jumlah kendaraan wajib uji yang datang tahun 2023 sebanyak 9.004 kendaraan. - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji berkala pada kendaraan bermotornya. - Kondisi alat uji terutama pada alat uji <i>break tester dan Axle Load</i> (alat uji pengereman dan timbangan) yang sering mengalami trouble/gangguan sehingga pelayanan sering terganggu. - Kurangnya intensitas pemeriksaan operasi laik jalan terhadap kendaraan wajib uji di jalan.
DLH	Retribusi Kebersihan	<ul style="list-style-type: none"> - Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan PT. AMGM, pungutan pelanggan untuk hotel telah dihentikan sehingga harus dipungut sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup. - Adanya perbedaan penggolongan tarif antara PT. AMGM dengan amanat Perda No. 14/2011 J.o No. 12/2016 tentang retribusi jasa umum (saat ini sedang dilakukan penyesuaian tarif termasuk penggolongan). - Realisasi Retribusi Kebersihan ini sangat tergantung pada pembayaran rekening kebersihan air PT. AMGM karena tidak semua pelanggan PT. AMGM yang berjumlah 72.599 pelanggan yang aktif - Realisasi pungutan secara langsung oleh juru pungut yang ditugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup mendapat kendala dikarenakan masyarakat merasa double membayar sampah, dalam artian iuran sampah lingkungan dan retribusi sampah dinas.
DPMPSTP	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar permohonan persetujuan bangunan gedung pada tahun 2023 didominasi oleh permohonan PBG bangunan Kompleksitas sederhana sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target PBG tidak signifikan. - Belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap bangunan yang berdiri tanpa PBG sehingga berpengaruh terhadap minat pemilik bangunan untuk mengajukan PBG.
DIKES	Retribusi Pelayanan Kesehatan-Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan adanya UHC semua warga Kota Mataram mendapatkan pelayanan di puskesmas dan jaringannya secara gratis. - Tarif retribusi masih mengikuti tarif lama (Perda No. 14 Tahun 2011) yang sudah tidak relevan. - Realisasi yang dipengaruhi oleh jumlah kunjungan pasien luar Kota Mataram yang tidak dapat diprediksi.
DIKES	Retribusi Pemakaian Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif yang belum disesuaikan dengan usulan terbaru, tahun 2022 masih menggunakan tarif lama (Perda No. 14 Tahun 2011). - Tarif lama (Perda No. 14 Tahun 2011) bukan berdasarkan Permenkes tetapi berdasarkan SNI Nomor 7388 Tahun 2009. - Ada beberapa pemeriksaan di laboratorium yang dilakukan tetapi tidak tercantum tarifnya di Perda No. 14 Tahun 2011 contohnya pemeriksaan swab, amonia dan lain-lain; - Target yang terlalu tinggi.
DIKES	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi yang dipengaruhi oleh jumlah kepesertaan. - Target yang terlalu tinggi.
D. PUPR	Retribusi Penyedotan Kakus	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelayanan penyedotan lumpur tinja hanya menggunakan armada truk yang tidak bisa melakukan penyedotan di jalan lingkungan/gang kecil sehingga banyak calon pelanggan yang beralih ke penyedotan swasta yang menggunakan roda tiga/pick up.
D. PUPR	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Besaran retribusi yang sangat kecil, retribusi yang berlaku saat ini sesuai Perda No. 14 Tahun 2011 sudah tidak relevan dengan biaya operasional penyedotan saat ini. Perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak tahun 2021 namun hingga saat ini belum disahkan. - Kondisi alat berat yang sudah tua. - Jumlah penyewa untuk alat tersebut sedikit

SKPD	Jenis Retribusi	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan alat lebih banyak untuk kegiatan sosial - Banyak penyewaan alat milik swasta.
DISDAG	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan target yang tinggi dan tidak sesuai potensi karena target yang ditetapkan dihitung berdasarkan tarif baru (2 x lipat), namun regulasi Perdanya belum ada sehingga tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, potensi tahun 2023 dihitung sesuai dengan tarif lama sebagaimana diatur dalam Perwal Nomor 2 Tahun 2021, berdasarkan jumlah obyek retribusi, potensi hanya sebesar Rp1.105.141.200,-namun penetapan target sebesar Rp2.500.000.000,- dengan asumsi tarif baru dapat dilaksanakan. - Beberapa kondisi toko/kios sudah tidak aktif seperti pasar karang sukun, pasar dasan agung, pasar rembiga, pasar cakranegara, pasar mandalika dan pasar pegesangan. - Kualitas dan Kuantitas SDM petugas penagihan masih kurang. - Tool/Sarpras dalam melakukan penagihan masih kurang memadai. - Sampai saat ini masih banyak kondisi pertokoan yang memerlukan revitalisasi contoh pertokoan di pasar cakranegara, mandalika, sayang-sayang dan pasar kebon roek kondisinya sangat memperhatikan - Sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan pola pemungutan konvensional karena belum menerapkan retribusi non tunai sehingga potensi terjadinya kebocoran cukup besar.
DISNAKER	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	<ul style="list-style-type: none"> - Target PAD tidak bisa terealisasi karena ada penurunan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA), baik TKA baru maupun TKA perpanjangan kontrak yang wilayah kerjanya di Kota Mataram

Dalam menindaklanjuti permasalahan dan solusi pendapatan, Pemerintah Kota Mataram berupaya untuk mengidentifikasi setiap permasalahan dan solusi untuk mengatasinya baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah sehingga tidak memberatkan masyarakat. Berikut beberapa masalah dan solusi yang dapat diidentifikasi dan dipetakan antara lain:

Tabel 3.4. Permasalahan dan Solusi Pendapatan

PERMASALAHAN	SOLUSI
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Tingkat kepatuhan/kesadaran wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Pengawasan dan Koordinasi dalam rangka meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan Daerah. ➢ Meningkatkan Pengawasan yang diikuti dengan pemeriksaan internal secara administratif terhadap hasil pungutan pajak daerah.
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Ketersediaan sumber daya baik sumber daya aparatur bidang pendapatan maupun sumber daya peralatan terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Sumber Daya yang tersedia dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Daerah, termasuk sumberdaya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. ➢ Membuat Inovasi Bidang Pendapatan dalam rangka Optimalisasi PAD ➢ Meningkatkan Kinerja Aparatur dengan Melakukan Pelatihan/Bintek serta Capacity Building dalam Pengelolaan PAD
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Update data hasil pendataan pajak daerah sebagai dasar perhitungan potensi kurang efektif.. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan Penguatan sistim pelaporan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang didukung dengan analisa data potensi secara maksimal. ➢ Meningkatkan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah.

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pengajuan draft rancangan produk-produk hukum pajak daerah tidak tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menyusun Produk Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai/ sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Terbaru (UU No. 1 Tahun 2022 Tentang HKPD)
<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keterlambatan penyampaian laporan data PAD dari masing-masing OPD . 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait sebagai OPD pengelola sumber PAD. ➢ Melakukan Evaluasi secara rutin setiap bulan baik secara intern maupun dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah pengelola sumber PAD lainnya dalam pengelolaan PAD.

3.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp1.653.900.067.407,07 atau 93,70% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.765.190.255.854,00, terdiri dari realisasi pada Belanja Operasi sebesar 94,47%, Belanja Modal sebesar 91,49%, Belanja Tak Terduga sebesar 0,71% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 100,00%. Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2023 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
BELANJA DAERAH	1.765.190.255.854,00	1.653.900.067.407,07	93,70
BELANJA OPERASI	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47
Belanja Pegawai	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34
Belanja Barang dan Jasa	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27
Belanja Bantuan Sosial	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10
BELANJA MODAL	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49
Belanja Tanah	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91
Belanja Peralatan dan Mesin	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62
Belanja Gedung dan Bangunan	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95
Belanja Aset Lainnya	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68
BELANJA TAK TERDUGA	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71
Belanja Tak Terduga	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, secara umum realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar 12,96%, terutama pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

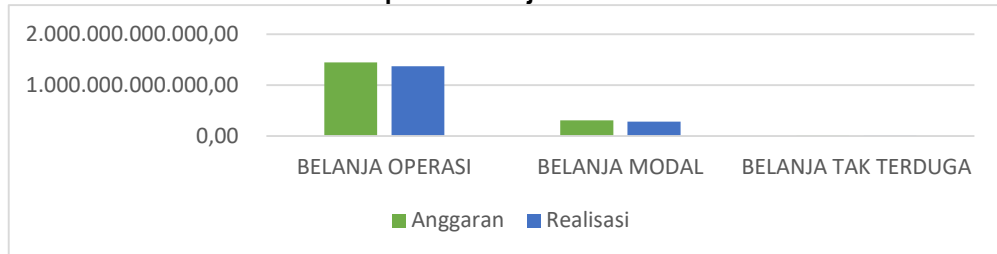
Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
BELANJA DAERAH	1.653.900.067.407,07	1.464.164.668.856,05	12,96
BELANJA OPERASI	1.369.444.965.929,07	1.287.767.626.136,05	6,34
Belanja Pegawai	582.272.814.082,00	565.614.183.592,00	2,95
Belanja Barang dan Jasa	677.683.569.029,07	642.421.610.056,05	5,49
Belanja Bunga	0,00	279.763.272,00	(100,00)
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
Belanja Hibah	85.182.145.969,00	62.881.075.691,00	35,47
Belanja Bantuan Sosial	24.306.436.849,00	16.570.993.525,00	46,68
BELANJA MODAL	281.979.453.862,00	174.005.861.795,00	62,06
Belanja Tanah	20.305.698.726,00	11.374.815.258,00	78,51
Belanja Peralatan dan Mesin	115.171.860.211,00	48.269.561.084,00	138,60
Belanja Gedung dan Bangunan	68.940.565.477,00	45.384.593.358,00	51,90
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.240.765.500,00	65.770.745.466,00	8,32
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.271.723.948,00	3.206.146.629,00	95,62
Belanja Aset Lainnya	48.840.000,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA	34.297.616,00	879.033.300,00	(96,10)
Belanja Tak Terduga	34.297.616,00	879.033.300,00	(96,10)
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00	61,45
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.441.350.000,00	1.512.147.625,00	61,45

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Perbandingan realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 3.2. Komposisi Belanja Kota Mataram 2023 dan 2022



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

3.3 Surplus Defisit

Pada akhir tahun 2023, Pemerintah Kota Mataram mengalami surplus anggaran senilai Rp14.382.821.907,03, terdiri dari surplus Badan Layanan Umum daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp9.267.732.649,78, pengelolaan dana JKN defisit sebesar Rp2.825.969.710,67, , serta defisit pengelolaan Dana BOS Satdikdas Negeri senilai Rp597.730.039,02, sementara APBD Kota Mataram diluar dana BLUD, JKN, dan Bos surplus senilai Rp1.691.389.587,56.

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman,dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

3.4 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Tahun Anggaran 2023, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan senilai Rp103.600.936.763,00 yang merupakan penerimaan SiLPA tahun lalu, dengan realisasi senilai Rp103.584.506.002,31 atau 99,98%. Terdapat realisasi Penerimaan Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi sebesar Rp9.360.755,00. Sementara Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan untuk penyertaan modal senilai Rp2.250.000.000,00 terealisasi

senilai Rp2.250.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan yaitu penyertaan modal pada PT. AMGM Giri Menang Mataram, sehingga total Pembiayaan Netto adalah senilai Rp 101.343.866.757,31

Rincian alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	Capaian
Penerimaan Pembiayaan	103.593.866.757,31	74.732.512.361,46	38,62
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	103.584.506.002,31	69.732.060.316,46	48,55
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	5.000.000.000,00	1.970,76
Penerimaan Kembali Dana Bergulir Kepada Koperasi	9.360.755,00	452.045,00	(100,00)
Pengeluaran Pembiayaan	2.250.000.000,00	7.250.000.000,00	(68,97)
Penyertaan Modal pada BUMD	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	5.000.000.000,00	(100,00)
PEMBIAYAAN NETTO	101.343.866.757,31	67.482.512.361,46	50,18

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

3.5 SiLPA

Pada akhir Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp115.726.688.664,34. SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp17.190.437.990,71, Dana JKN senilai Rp2.524.550.355,67 yang dikelola langsung oleh Puskesmas, serta Dana BOS Satdikdas Negeri yang dikelola oleh masing-masing sekolah senilai Rp254.257.847,28, Sementara SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp95.757.442.470,68

SILPA Pemerintah Kota Mataram sebesar Rp115.726.688.664,34 apabila dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek sebesar Rp73.367.437.129,94 maka diperoleh rasio 63,40%, hal ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Mataram untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek.

3.6 Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah

Meningkatnya kinerja keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan peningkatan kekayaan (aset) Pemerintah Kota Mataram sampai dengan 31 Desember 2023. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, jumlah aset seluruhnya senilai Rp3.848.747.084.099,47 atau terjadi peningkatan senilai Rp117.602.689.015,78 dari tahun sebelumnya atau bertambah 3,66% dari tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

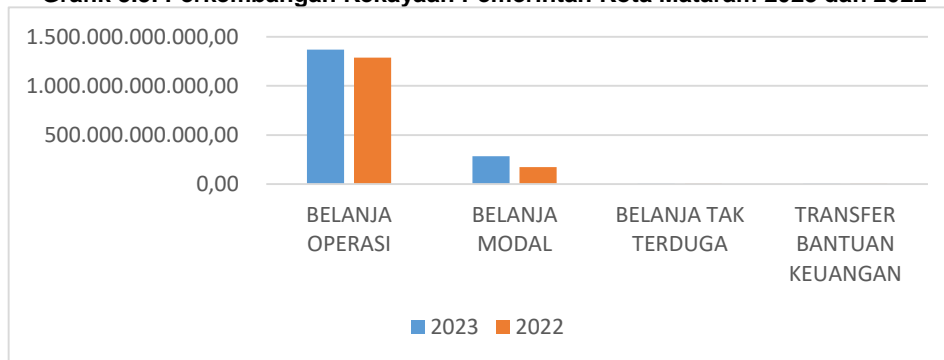
Tabel 3.8. Perkembangan Nilai Aset Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Aset	3.874.422.349.610,80	3.731.144.395.083,69
Aset Lancar	278.778.802.782,53	229.195.110.852,93
Investasi Jangka Panjang	185.193.091.551,10	179.853.800.259,32
Aset Tetap	3.085.990.869.737,45	2.983.948.159.021,08
Properti Investasi	13.685.481.323,00	13.629.680.823,00
Aset Lainnya	310.774.104.216,72	324.517.644.127,36

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Perkembangan pada masing-masing jenis aset seperti pada grafik berikut:

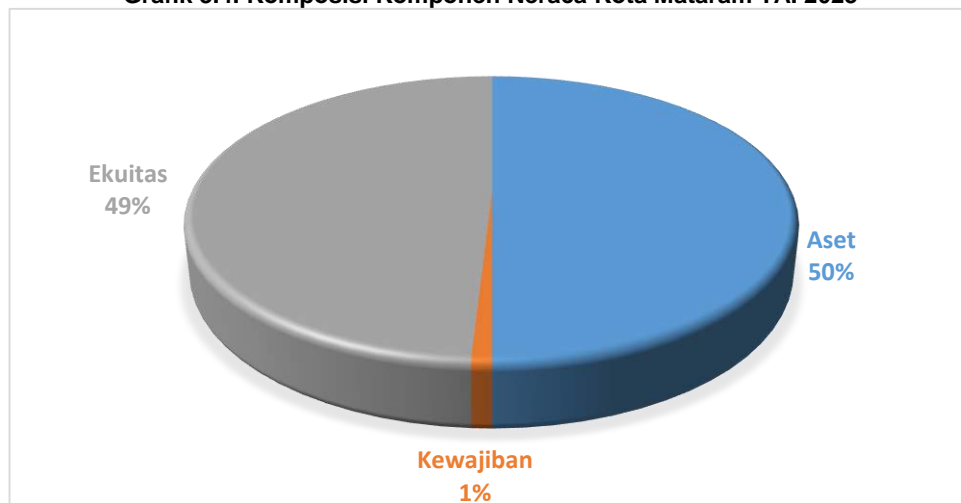
Grafik 3.3. Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram 2023 dan 2022



Sumber: BKD Kota Mataram

Bila dilihat dari sisi kewajiban dan ekuitas dana, terlihat bahwa kekayaan daerah tersebut diperoleh dari sebagian besar dari optimalisasi pengelolaan dana sendiri, karena terlihat angka ekuitas senilai Rp3.775.379.646.969,53, jauh lebih besar dibandingkan nilai kewajiban senilai Rp73.367.437.129,94. Artinya Likuiditasnya sudah sangat baik. Komposisi neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.4. Komposisi Komponen Neraca Kota Mataram TA. 2023



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram yang antara lain memuat:

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Mataram. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, Entitas akuntansi Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

Tabel 4.1. Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2023

KODE	OPD	KODE	OPD
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan	2.23.2.24.0.00.28.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.02.0.00.0.00.02.0000	Dinas Kesehatan	3.25.0.00.0.00.29.0000	Dinas Perikanan
1.02.0.00.0.00.03.0000	RSUD Kota Mataram	3.26.0.00.0.00.30.0000	Dinas Pariwisata
1.03.0.00.0.00.04.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.27.0.00.0.00.31.0000	Dinas Pertanian
1.04.2.10.0.00.05.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.30.0.00.0.00.32.0000	Dinas Perdagangan
1.05.0.00.0.00.06.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	4.01.0.00.0.00.33.0000	Sekretariat Daerah
1.05.0.00.0.00.07.0000	Dinas Pemadam Kebakaran	4.02.0.00.0.00.34.0000	Sekretariat DPRD
1.05.0.00.0.00.09.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.01.0.00.0.00.36.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.0.00.0.00.10.0000	Dinas Sosial	5.02.0.00.0.00.37.0000	Badan Keuangan Daerah
2.07.3.32.0.00.11.0000	Dinas Tenaga Kerja	5.03.0.00.0.00.38.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
2.08.0.00.0.00.12.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.05.0.00.0.00.39.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan
2.09.0.00.0.00.13.0000	Dinas Ketahanan Pangan	6.01.0.00.0.00.35.0000	Inspektorat Daerah
2.11.0.00.0.00.14.0000	Dinas Lingkungan Hidup	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Cakranegara
2.12.0.00.0.00.15.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Sandubaya
2.14.0.00.0.00.22.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Mataram
2.15.0.00.0.00.23.0000	Dinas Perhubungan	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Selaparang
2.16.2.20.2.21.24.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Ampenan
2.17.3.31.0.00.25.0000	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Sekarbela

KODE	OPD	KODE	OPD
2.18.0.00.0.00.26.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.01.0.00.0.00.20.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.19.0.00.0.00.27.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		

4.2. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Asumsi kemandirian entitas
Berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi kesinambungan entitas
Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)
Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut:

- a. Basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
- c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- d. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b) Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah atau kas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c) Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e) Pengembalian / koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang Pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar (SiLPA).
- f) Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

2. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah atau kas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.
- c) Koreksi atas pengeluaran Belanja yang terjadi pada periode akuntansi berjalan dicatat sebagai pengurang Belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- d) Belanja diklasifikasikan menurut Kelompoknya antara lain: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2023

dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya;
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, merupakan SiLPA Tahun sebelumnya yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menambah dan mengurangi Saldo Anggaran Lebih;
5. Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan transaksi yang menambah Saldo Anggaran Lebih dan transaksi yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih.

c. Neraca

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset Lancar antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, Persediaan dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

a) Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

d) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum

diterima. Piutang Pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

- e) Piutang Retribusi
Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Piutang Retribusi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.
- f) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.
- g) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.
- h) Piutang Lainnya
Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.
- i) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.
Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis piutang:
 - 1) Piutang Pajak
Untuk Piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:
 - (a) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
 - (b) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%;
 - (c) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;

- (d) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%; dan
- (e) Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

2) Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- (f) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- (g) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%; dan
- (h) Diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

j) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo Persediaan adalah jumlah Persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Metode pencatatan Persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan metode fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan metode perpetual.

Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan yang dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun persediaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan sebenarnya. Sedangkan metode pencatatan periodik adalah pencatatan atas persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk dilakukan pembukuan.

2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

b) Investasi Permanen Lainnya - Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat

dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan perhitungan *NRV* berdasarkan umur investasi, yaitu:

- 1) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disisihkan sebesar 10%;
 - 2) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, disisihkan sebesar 25%;
 - 3) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, disisihkan sebesar 50%;
 - 4) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 75%; dan
 - 5) Diatas 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 100%.
3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan.

a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai Aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka Tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga Aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya

lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Terkait batas nilai minimum kapitalisasi aset untuk kepentingan pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2. Batas nilai minimum kapitalisasi aset untuk kepentingan pemeliharaan

No.	Uraian	Jumlah Harga dalam Lusin / Set / Satuan (Rp)
I	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1	Alat-alat Berat	5.000.000,00
2	Alat-alat Angkutan	1.500.000,00
3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000,00
4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	300.000,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	-Alat-alat Kantor	300.000,00
	-Alat-alat Rumah Tangga	300.000,00
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
7	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
9	Alat Keamanan	300.000,00
II	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
1	Bangunan Gedung	7.500.000,00
2	Bangunan Monumen	5.000.000,00
III	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas:	
1	Jalan dan Jembatan	7.500.000,00
2	Bangunan Air/Irigasi	7.500.000,00
3	Instalasi	300.000
4	Jaringan	300.000

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

- a) Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo Tagihan Penjualan Angsuran.
 - b) Aset Lain-lain
Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan.
 - c) Aset Tidak Berwujud
Yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:
 - 1) *Software* komputer;
 - 2) Lisensi dan *franchise*;
 - 3) Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya;
 - 4) Hak jasa dan operasi;
 - 5) Aset tak berwujud dalam pengembangan.
5. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Mataram. Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman.
- a) Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
Terhadap barang/jasa yang telah diterima Pemerintah Kota Mataram dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.
 - b) Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Mataram baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.
 - c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongannya untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- e) Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas.
- 6. Kewajiban Jangka Panjang
Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek, jika:
 - a) Jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang pendanaan kembali (*refinancing*), atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan substansi kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.
- 7. Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Operasional

- 1. Pendapatan-LO
Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan-LO antara lain:
 - a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b) Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu:
 - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
 - c) Pendapatan-LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas terdiri dari :
 - 1) PAD dengan mekanisme *self assessment* (semua jenis pajak dan retribusi); dan
 - 2) Dana Perimbangan.
 - d) Pendapatan-LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas:
 - 1) PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (Pajak PBB, Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah); dan
 - 2) PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui setelah penerimaan kas adalah Pajak Reklame.

- e) Pencatatan Pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - f) Pengukuran Pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
 - g) Pengukuran Pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
 - h) Pengembalian/koreksi atas penerimaan Pendapatan-LO yang terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LO.
 - i) Pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode akuntansi dibukukan sebagai pengurang Pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
 - j) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain: Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.
 - k) Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.
2. Beban-LO
- Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Beban-LO yaitu:
- a) Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.
 - b) Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
 - c) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - d) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dikelompokkan dalam beban Operasional, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Berdasarkan jenisnya Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

- f) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (*contra post*) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- g) Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
- h) Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah signifikan.
 - 1) Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (beban yang didahului dengan tagihan).
 - 2) Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo).
- i) Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (non Kas). Contoh: Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang.
- j) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, dan transfer masuk. Sedangkan arus kas keluarnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan transfer keluar.
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus kas keluarnya antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang dan pembentukan dana cadangan.

4. Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK sedangkan arus kas keluarnya meliputi pengeluaran PFK.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos, antara lain:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/defisit-LO;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
4. Ekuitas Akhir.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 disusun menggunakan basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram; Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Mataram; dan Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 58 Tahun 2022 tanggal tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram.

Penjelasan atas Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Komponen – komponen Akun LRA

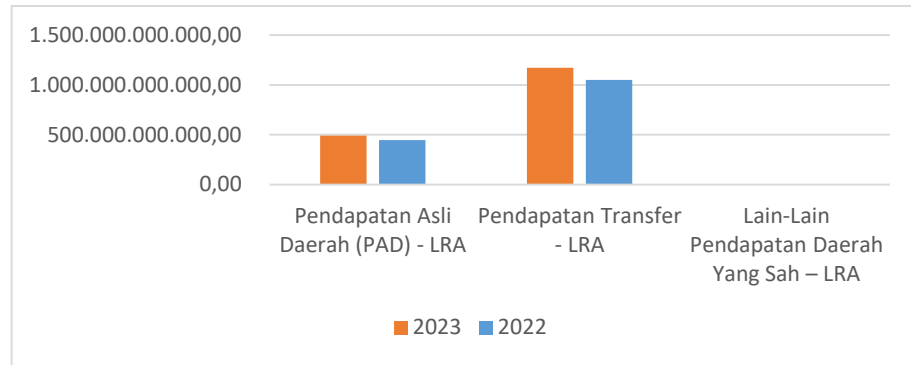
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kota Mataram yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kota Mataram pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

4. Pendapatan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022. Realisasi Tahun 2023 senilai Rp1.668.282.889.314,10 dan Tahun 2022 senilai Rp1.500.283.093.258,05, dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 dan Tahun 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	447.862.217.089,00	493.302.232.061,10	110,15	446.332.721.389,05
Pendapatan Transfer	1.212.227.102.002,00	1.171.230.657.253,00	96,62	1.051.642.188.665,00
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00
Jumlah	1.663.839.319.091,00	1.668.282.889.314,10	100,27	1.500.283.093.258,05



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

4.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 Realisasi Tahun 2023 senilai Rp493.302.232.061,10 dan Tahun 2022 senilai Rp446.332.721.389,05, dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 dan Tahun 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah	177.500.000.000,00	186.734.992.240,00	105,20	174.244.254.094,00
Pendapatan Retribusi Daerah	46.559.540.150,00	30.719.987.941,23	65,98	26.844.304.569,93
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.093.059.225,00	14.194.537.893,00	100,72	12.273.219.522,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	209.709.617.714,00	261.652.713.986,87	124,77	232.970.943.203,12
Jumlah	447.862.217.089,00	493.302.232.061,10	110,15	446.332.721.389,05

4.1.01. Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 Realisasi Tahun 2023 senilai Rp186.734.992.240,00 dan Tahun 2022 senilai Rp174.244.254.094,00, dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 dan Tahun 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Hotel	26.000.000.000,00	30.681.859.458,00	118,01	24.410.353.087,00
Pajak Restoran	39.000.000.000,00	40.468.500.744,00	103,77	31.922.870.556,00
Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.125.704.087,00	111,38	4.631.710.978,00
Pajak Reklame	5.000.000.000,00	2.302.889.727,00	46,06	6.085.570.558,00
Pajak Penerangan Jalan	43.000.000.000,00	45.049.777.369,00	104,77	42.921.727.121,00
Pajak Parkir	2.500.000.000,00	2.569.870.912,00	102,79	3.231.067.842,00
Pajak Air Tanah	2.000.000.000,00	2.395.983.826,00	119,80	1.395.384.967,00
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	28.000.000.000,00	28.131.145.263,00	100,47	29.239.610.930,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	26.500.000.000,00	29.008.960.854,00	109,47	30.405.658.055,00
Jumlah	177.500.000.000,00	186.734.992.240,00	105,20	174.244.254.094,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - Untuk Pajak Reklame,rendahnya presentase pencapai realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan dikarenakan perubahan aturan yang mengikuti masa pajak reklame pada tahun berikutnya;
 - Tercapainya persentase pajak daerah sesuai target anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan pada periode 2023 seperti:
 - Penambahan Kanal (saluran) pembayaran pajak daerah
 - Peningkatan pengawasan pajak daerah dalam bentuk Uji Kepatuhan Kelayakan Omzet (KKO) dan pengawasan berbasis masyarakat (BKD Giveaway #AwasTitipan Pajak Anda)
 - Peningkatan pemeliharaan dan monitoring alat pengawas pajak daerah yaitu tapping box dan smart tax
- Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Peraturan Daerah sebagai berikut.
 - Perda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 - Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel;
 - Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran ;
 - Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran;
 - Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - Perda Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan;
 - Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
 - Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
 - Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
 - Perda Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame;
 - Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - Perda Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;
 - Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Parkir;
 - Perda Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;

- q. Perda Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah;
- r. Perda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah;
- s. Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- t. Perda Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- u. Perda Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- v. Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- w. Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 125 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
- x. Perda Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet; dan
- y. Perda Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

4.1.01.06.01.1. Pendapatan Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 senilai Rp30.681.859.458,00 dari anggaran senilai Rp26.000.000.000,00 atau 105,20%, nilai realisasi Tahun 2022 senilai Rp24.410.353.087,00. Tercapainya persentase pajak hotel sebesar 105,20% sesuai target anggaran yang ditetapkan dikarenakan adanya inovasi-inovasi yang dilaksanakan pada periode 2023 seperti:

1. Penambahan Kanal (saluran) pembayaran pajak daerah
2. Peningkatan pengawasan pajak daerah dalam bentuk Uji Kepatuhan Kelayakan Omzet (KKO) dan pengawasan berbasis masyarakat (BKD Giveaway # Awastitipan Pajak Anda)
3. Peningkatan pemeliharaan dan monitoring alat pengawas pajak daerah yaitu tapping box dan *smart tax*

4.1.01.07 Pendapatan Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp40.468.500.744,00 dan Rp 31.922.870.556,00 atau 103,77%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Restoran	39.000.000.000,00	40.468.500.744,00	103,77	31.922.870.556,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	37.500.000.000,00	37.988.718.784,00	101,30	29.689.599.957,00
Pajak Boga/Katering dan Sejenisnya	1.500.000.000,00	2.479.781.960,00	165,32	2.233.270.599,00

4.1.01.07.01 Pendapatan Pajak Restoran dan Sejenisnya

Realisasi Pajak Restoran dan sejenisnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp37.988.718.784,00 atau 101,30% lebih senilai Rp488.718.784,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp29.689.599.957,00

4.1.01.07.07 Pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Realisasi Pajak Restoran dan sejenisnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.479.781.960,00 atau 165,32%, dari anggaran senilai Rp1.500.000.000,00 lebih senilai Rp979.781.960,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.233.270.599,00

4.1.01.08 Pendapatan Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp6.125.704.087,00 dan Rp4.631.710.978,00 atau 111,38%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	6.125.704.087,00	111,38	4.631.710.978,00
Pajak Tontonan Film	2.000.000.000,00	2.224.303.632,00	111,22	2.130.784.283,00
Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari Busana	500.000.000,00	419.678.775,00	83,94	437.085.070,00
Pajak Pameran	130.000.000,00	177.558.637,00	136,58	0,00
Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	300.000.000,00	375.530.000,00	125,18	266.289.721,00
Pajak Permainan Biliar dan Bowling	180.000.000,00	205.238.085,00	114,02	148.261.500,00
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2.200.000.000,00	2.572.908.233,00	116,95	1.502.251.804,00
Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000,00	150.486.725,00	100,32	147.038.600,00
Pajak Pertandingan Olahraga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.01.08.01 Pendapatan Pajak Tontonan Film

Realisasi Pajak Tontonan Film sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.224.303.632,00 dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 atau 111,22% lebih senilai Rp224.303.632,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.130.784.283,00.

4.1.01.08.02 Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

Realisasi Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp419.678.775,00 atau 83,94%, dari anggaran senilai Rp500.000.000,00 kurang senilai Rp80.321.225,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 dan Rp437.085.070,00.

4.1.01.08.04 Pendapatan Pajak Pameran

Realisasi Pajak Pameran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp177.558.637,00 dari anggaran senilai Rp130.000.000,00 atau 136,58% lebih senilai Rp47.558.637,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 nihil.

4.1.01.08.05 Pendapatan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Realisasi Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp375.530.000,00 atau 125,18%, dari anggaran senilai Rp300.000.000,00, lebih senilai Rp75.530.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp266.289.721,00.

4.1.01.08.07 Pendapatan Pajak Permainan Biliar dan Bowling

Realisasi Pajak Permainan Biliar dan Bowling sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp205.238.085,00 atau 114,02%, dari anggaran senilai Rp180.000.000,00, lebih senilai Rp25.238.085,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp148.261.500,00.

4.1.01.08.08 Pendapatan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Realisasi Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.572.908.233,00 atau 116,95% dari anggaran 2.200.000.000,00, lebih senilai Rp372.908.233,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.502.251.804,00.

4.1.01.08.09 Pendapatan Pajak Pijet, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center)

Realisasi Pajak Pijet, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp150.486.725,00 atau 100,32% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00 lebih senilai Rp486.725,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp147.038.600,00.

4.1.01.08.10 Pendapatan Pajak Pertandingan Olah Raga

Realisasi Pajak Pertandingan Olah Raga sampai dengan 31 Desember 2023 nihil dari anggaran Rp40.000.000,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 nihil.

4.1.01.09 Pendapatan Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp2.302.889.727,00 dan Rp6.085.570.558,00 atau 46,06% dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pajak Reklame	5.000.000.000,00	2.302.889.727,00	46,06	6.085.570.558,00
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	4.800.000.000,00	2.200.590.129,00	45,85	5.995.454.388,00
Pajak Reklame Kain	100.000.000,00	31.316.025,00	31,32	41.496.790,00
Pajak Reklame Berjalan	100.000.000,00	70.983.573,00	70,98	48.619.380,00



4.1.01.09.01 Pendapatan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

Realisasi Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.200.590.129,00 atau 45,85%, dari anggaran senilai Rp4.800.000.000,00 kurang senilai Rp2.599.409.871,00, sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp5.995.454.388,00

4.1.01.09.02 Pendapatan Pajak Reklame Kain

Realisasi Pajak Reklame Kain sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp31.316.025,00 atau 31,32% dari anggaran senilai Rp100.000.000,00, kurang senilai Rp68.683.975,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp41.496.790,00

4.1.01.09.05 Pendapatan Pajak Reklame Berjalan

Realisasi Pajak Reklame Berjalan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp70.983.573,00 atau 70,98%, dari anggaran senilai Rp100.000.000,00 kurang senilai Rp29.016.427,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp48.619.380,00

4.1.01.10.02 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp45.049.777.369,00 atau 104,77% dari anggaran senilai Rp43.000.000.000,00, lebih senilai Rp2.049.777.369,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp42.921.727.121,00

4.1.01.11.01 Pendapatan Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.569.870.912,00 atau 102,79% dari anggaran 2.500.000.000,00 lebih senilai Rp69.870.912,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp3.231.067.842,00

4.1.01.12.01 Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.395.983.826,00 atau 119,80% dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 lebih senilai Rp395.983.826,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp1.395.384.967,00

4.1.01.13.01 Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp300.000,00 atau 0,00% dari anggaran senilai Rp0,00 lebih senilai Rp300.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp300.000,00

4.1.01.15.01 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp28.131.145.263,00 atau 100,47% dari anggaran senilai Rp28.000.000.000,00 lebih senilai Rp131.145.263,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp29.239.610.930,00

4.1.01.16.01 Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp29.008.960.854,00 atau 109,47% dari anggaran senilai Rp26.500.000.000,00 lebih senilai Rp2.508.960.834,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp30.405.658.055,00

4.1.02 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022, Realisasi Tahun 2023 senilai Rp30.719.987.941,23 dan Tahun 2022 senilai Rp26.844.304.569,93 persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000.000.000,00	3.181.562.000,00	53,03	2.939.298.800,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000.000,00	5.083.812.000,00	50,84	4.997.080.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000.000,00	9.317.445.987,00	84,70	8.200.045.351,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	5.908.642.000,00	78,78	5.680.699.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	614.210.000,00	30,71	657.810.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	44.360.000,00	29,57	43.945.500,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.000.000,00	66.979.500,00	121,78	72.724.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000,00	1.156.000.000,00	111,15	994.503.660,00
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	923.840.150,00	186.755.275,00	20,22	203.965.950,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.570.700.000,00	1.198.464.253,23	46,62	941.617.974,93
• Retribusi Rumah Potong Hewan	220.000.000,00	442.219.885,00	201,01	343.482.600,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.717.231.234,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	69.600.000,00	139,20	51.900.000,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	160.591.660,00	80,30	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.850.000.000,00	3.289.345.381,00	67,82	0,00
Jumlah	46.559.540.150,00	30.719.987.941,23	65,98	26.844.304.569,93

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Umum
 - 1) Retribusi Pelayanan Puskesmas rendah disebabkan dengan adanya UHC semua warga Kota Mataram mendapatkan pelayanan di puskesmas dan jaringannya secara gratis, tarif retribusi masih mengikuti tarif lama (Perda Nomor 14 Tahun 2011) yang sudah tidak relevan, realisasi yang di pengaruhi oleh kunjungan pasien luar Kota Mataram yang tidak dapat di prediksi.
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rendah disebabkan Adendum Perjanjian Kerja Sama dengan PDAM, pungutan pelanggan untuk hotel telah dihentikan sehingga harus dipungut sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, adanya perbedaan penggolongan tarif antara PDAM dengan amanat Perda Nomor 14/2011 J.O Nomor 12/2016 Tentang Retribusi Jasa Umum (saat ini sedang dilakukan penyesuaian tarif termasuk penggolongan), Realisasi Retribusi Kebersihan tergantung pada pembayaran rekening kebersihan air PDAM karena tidak semua pelanggan PDAM yang berjumlah 72.599 pelanggan yang aktif dan Realisasi pungutan secara langsung oleh juru pungut yang ditugaskan oleh lingkungan hidup mendapat kendala dikarenakan masyarakat merasa double membayar sampah, dalam artian iuran sampah lingkungan dan retribusi sampah dinas.
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum rendah disebabkan parkir yang sudah ditetapkan dalam ketentuan pajak parkir sehingga potensi ketentuan retribusi parkir menjadi berkurang dan masih banyak juru parkir tidak patuh dan taat membayar retribusi parkir
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar rendah disebabkan pengelolaan pasar tidak berbanding lurus dengan peningkatan potensi retribusi
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor rendah kurangnya kesadaran pemilik kendaraan melakukan wajib uji kendaraan secara berkala, tingginya target yang diberikan sementara jumlah kendaraan wajib uji yang datang tahun 2023 sebanyak 9.004 kendaraan dan kurangnya intensitas pemeriksaan operasi tak jalan terhadap kendaraan wajib uji di jalan
 - 6) Retribusi Penyedotan Kakus rendah disebabkan karena pelayanan penyedotan lumpur tinja hanya menggunakan armada truk yang tidak bisa melakukan penyedotan di jalan lingkungan/gang kecil sehingga banyak calon pelanggan yang beralih ke penyedotan swasta yang menggunakan roda tiga/*pick up*.
 - 7) Retribusi Pelayanan Tera Ulang tinggi disebabkan aktifnya Dinas Perdagangan tera ulang.
 - 8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi disebabkan ada 2 provider tahun 2022 pembayarannya dilakukan di awal tahun 2023

- c. Retribusi Jasa Usaha
 - 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disebabkan besaran retribusi yang terlalu kecil, retribusi yang berlaku saat ini sesuai Perda Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak relevan dengan biaya operasional penyedotan saat ini, perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak Tahun 2021 namun sejak saat ini belum disahkan dan kondisi alat berat yang sudah tua.
 - 2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan rendah disebabkan realisasi bersumber dari penyewaan tanah penyatu.
 - 3) Retribusi Pemakaian Laboratorium rendah disebabkan tarif yang belum disesuaikan dengan usulan terbaru, Tahun 2023 masih menggunakan tarif lama (Perda Nomor 14 Tahun 2011), ada beberapa pemeriksaan di laboratorium dilakukan tetapi tidak tercantum tarifnya di Perda contohnya pemeriksaan swab dan amonia dan target yang terlalu tinggi
 - 4) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor rendah disebabkan perubahan besaran retribusi sudah mulai diajukan sejak Tahun 2021 namun sejak saat ini belum disahkan serta kondisi alat berat yang sudah tua dan jumlah penyewa yang sedikit.
 - 5) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan rendah disebabkan sistem pemungutan retribusi yang masih menggunakan pola pemungutan kompesional karena belum menerapkan retribusi non tunai sehingga potensi terjadinya kebocoran cukup besar, kualitas dan kuantitas SDM petugas penagihan masih kurang memadai, dan banyak kondisi toko/kios yang sudah tidak aktif.
 - 6) Retribusi Rumah Potong Hewan tinggi disebabkan ; karena permintaan daging di pasar meningkat sehingga jumlah ternak yang dipotong meningkat dan dari kir ulang daging beku mengalami peningkatan, selain itu meningkatnya daya beli masyarakat yang cukup tinggi membuat ternak yang di bawa kepasar meningkat.
- d. Retribusi Perijinan Tertentu
 - 1) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tinggi disebabkan ; adanya pelaku usaha baru penjualan minuman beralkohol.
 - 2) Retribusi Perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing rendah; adanya penurunan jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) baik TKA baru maupun TKA perpanjangan kontrak, yang wilayah kerjanya di Kota Mataram.
 - 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung rendah disebabkan belum efektifnya pemberlakuan sanksi terhadap bangunan yang berdiri tanpa PBG sehingga berpengaruh terhadap minat pemilik bangunan untuk mengajukan PBG dan sebagian besar permohonan persetujuan bangunan gedung pada tahun 2023 di dominasi oleh permohonan PBG bangunan kompleksitas sederhana sehingga kontribusinya terhadap pencapaian target PBG tidak signifikan.
1. Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut.
 - a. Perda Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah di rubah dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum
 - b. Perda Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan ;
 - c. Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perizinan.

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp25.373.011.487,00 dan Rp23.586.106.811,00 atau 67,22%, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Umum				
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	6.000.000.000,00	3.181.562.000,00	53,03	2.939.298.800,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000.000,00	5.083.812.000,00	50,84	4.997.080.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	11.000.000.000,00	9.317.445.987,00	84,70	8.200.045.351,00
• Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000,00	5.908.642.000,00	78,78	5.680.699.000,00
• Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000,00	614.210.000,00	30,71	657.810.000,00
• Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000,00	44.360.000,00	29,57	43.945.500,00
• Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.000.000,00	66.979.500,00	121,78	72.724.500,00
• Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000,00	1.156.000.000,00	111,15	994.503.660,00
Jumlah	37.745.000.000,00	25.373.011.487,00	67,22	23.586.106.811,00

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.181.562.000,00 atau 53,03% dari anggaran senilai Rp6.000.000.000,00 kurang senilai Rp2.818.438.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp30.405.658.055,00

4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.083.812.000,00 atau 50,84% dari anggaran senilai Rp10.000.000.000,00 kurang senilai Rp4.916.188.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp4.997.080.000,00

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp9.317.445.987,00 atau 84,70% dari anggaran senilai Rp11.000.000.000,00 kurang senilai Rp1.682.554.013,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp8.200.045.351,00

4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.908.642.000,00 atau 78,78% dari anggaran senilai Rp7.500.000.000,00 kurang senilai Rp1.591.358.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp5.680.699.000,00

- 4.1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**
Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp614.210.000,00 atau 30,71% dari anggaran senilai Rp2.000.000.000,00 kurang senilai Rp1.385.790.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp657.810.000,00
- 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**
Realisasi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp44.360.000,00 atau 29,57% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00 kurang senilai Rp105.640.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp43.945.500,00
- 4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**
Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp66.979.500,00 atau 121,78% dari anggaran senilai Rp55.000.000,00 lebih senilai Rp11.979.500,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp72.724.500,00
- 4.1.02.01.11 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**
Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.156.000.000,00 atau 111,15% dari anggaran senilai Rp1.040.000.000,00 lebih senilai Rp116.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp994.503.660,00
- 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha**
Realisasi Retribusi Jasa Usaha sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp1.827.439.413,23 dan Rp1.489.066.524,93 atau 49,20%, dengan rincian sebagai

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha				
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	923.840.150,00	186.755.275,00	20,22	203.965.950,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.570.700.000,00	1.198.464.253,23	46,62	941.617.974,93
• Retribusi Rumah Potong Hewan	220.000.000,00	442.219.885,00	201,01	343.482.600,00
Jumlah	3.714.540.150,00	1.827.439.413,23	49,20	1.489.066.524,93

- 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**
Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp186.755.275,00 atau 20,22% dari anggaran senilai Rp923.840.150,00 kurang senilai Rp116.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp994.503.660,00

4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Realisasi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.198.464.253,23 atau 46,62% dari anggaran senilai Rp2.570.700.000,00 kurang senilai Rp1.372.235.746.,77 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp941.617.974,93

4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp442.219.885,00 atau 201,01% dari anggaran senilai Rp220.000.000,00 lebih senilai Rp222.219.885,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp343.482.600,00

4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 senilai Rp3.519.537.041,00 dan Rp1.769.131.234,00 atau 69,01%, dengan rincian sebagai

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Perizinan Tertentu				
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	1.717.231.234,00
• Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000,00	69.600.000,00	139,20	51.900.000,00
• Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000,00	160.591.660,00	80,30	0,00
• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.850.000.000,00	3.289.345.381,00	67,82	,00
Jumlah	5.100.000.000,00	3.519.537.041,00	69,01	1.769.131.234,00

4.1.02.03.02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp69.600.000,00 atau 139,20% dari anggaran senilai Rp50.000.000,00 lebih senilai Rp19.600.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp51.900.000,00

4.1.02.03.06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp160.591.660,00 atau 80,30% dari anggaran senilai Rp200.000.000,00 kurang senilai Rp39.408.340,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.289.345.381,00 atau 67,82% dari anggaran senilai Rp4.850.000.000,00 kurang senilai Rp1.560.654.619,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.02. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Realisasi Tahun 2023 senilai Rp14.194.537.893,00 dan Tahun 2022 senilai Rp12.273.219.522,00, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.152.795.155,00	5.233.207.101,00	101,56	3.964.245.004,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	41.066.722,00	205,33	25.426.352,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	8.920.264.070,00	8.920.264.070,00	100,00	8.283.548.166,00
Jumlah	14.093.059.225,00	14.194.537.893,00	100,72	12.273.219.522,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.
 - a. Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari dividen yang disetorkan oleh perusahaan daerah dimana Pemerintah Kota Mataram melakukan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada empat Perusahaan Daerah yaitu: PT.Air Minum Giri Menang Mataram,PD.BPR NTB, PT Jamkrida NTB Bersaing, dan PT Bank NTB Syariah realisasinya tergantung dari besar laba perusahaan.
2. Rincian penerimaan atas pada Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	14.093.059.225,00,	14.194.537.893,0	100,72	12.273.219.522,0
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.152.795.155,00	5.233.207.101,00	101,56	3.964.245.004,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000,00	41.066.722,00	205,33	25.426.352,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah	8.920.264.070,00	8.920.264.070,00	100,00	8.283.548.166,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)				

1. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Air Minum Giri Menang diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris Moh.Jazuli, SH.M.Kn Nomor.08/Not.MJ/WRM/LB/X/2023. tentang RUPS PT.Air Minum Giri Menang (PERSERODA) Tahun 2023;
2. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT BPR NTB (Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris. tentang RUPS /Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022;
3. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Jamkrida NTB Bersaing(Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris. tentang RUPS / Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 Perseroan Terbatas PT Jamkrida NTB Bersaing; dan
4. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Bank NTB Syariah (Perseroda) diakui berdasarkan RUPS dengan Akta Notaris. tentang RUPS/ Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank NTB Syariah Tanggal 15 Maret 2023.

4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah(Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp5.233.207.101,00 atau 101,56% dari anggaran senilai Rp5.152.795.155,00 lebih senilai Rp80.411.946,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp3.964.245.004,00

4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp41.066.722,00 atau 205,33% dari anggaran senilai Rp20.000.000,00 lebih senilai Rp21.066.722,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp25.426.352,00

4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)
Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp8.920.264.070,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp8.920.264.070,00 sesuai dengan yang dianggarkan sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp8.283.548.166,00

4.1.03. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022. Realisasi Tahun 2023 senilai Rp261.652.713.986,87 dan Tahun 2022 senilai Rp232.970.943.203,12, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	37.100.000,00	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.160.137.714,00	49.410.975,00	4,26	364.343.750,00
Jasa Giro	3.500.000.000,00	3.020.880.769,81	95,47	2.418.099.359,02
Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	3.062.500.602,34	204,17	2.692.979.452,06
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	2.583.961.164,90	103,36	1.359.584.287,73
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	23.917.396,00	0,00	28.266.747,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	43.591.246,45	0,00	12.457.575,26
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.100.000.000,00	1.714.298.499,80	155,85	1.112.483.771,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.000.000,00	2.104.300,00	105,22	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	47.480.000,00	127.220.624,00	267,95	226.765.500,80
Pendapatan BLUD	180.000.000.000,00	231.002.133.297,07	128,33	209.717.327.649,25
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	19.900.000.000,00	18.448.371.739,00	92,71	15.038.635.111,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	1.537.223.372,50	0,00	0,00
Jumlah	209.709.617.714,00	261.652.713.986,87	124,77	232.970.943.203,12

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diantaranya karena adanya peningkatan dari beberapa penerimaan antara lain: Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, pendapatan bunga Deposito, Penerimaan Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, penerimaan dari komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak daerah, dan denda retribusi daerah, serta pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak (Jaminan Bongkar)

4.1.04.01.02 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp37.100.000,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00.

4.1.04.03. Hasil Pemamfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Pemamfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp49.410.975,00 atau 4,26 % dari anggaran senilai Rp1.160.137.714,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp364.343.750,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Hasil Pemamfaatan MBD yang Tidak Dipisahkan				
• Hasil Sewa BMD	0,00	49.410.975,00	0,00	0,00
• Hasil Kerja Sama Pemamfaatan BMD	0,00	0,00	0,00	64.343.750,00
• Hasil dari Bangun Guna Serah	1.111.137.714,00	0,00	0,00	300.000.000,00
• Hasil dari Bangun Serah Guna	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.160.137.714,00	49.410.975,00	4,26	364.343.750,00

4.1.04.03.01 Hasil Sewa BMD

Realisasi Hasil Sewa BMD sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp49.410.975,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00.

4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemamfaatan BMD

Realisasi Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp64.343.750,00.

4.1.04.03.03 Hasil dari Bangun Guna Serah

Realisasi Hasil Bangun Guna Serah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp1.111.137.714,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp300.000.000,00

4.1.04.03.04 Hasil dari Bangun Serah Guna

Realisasi Hasil Bangun Serah Guna sampai dengan 31 Desember 2023 senilai 0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp49.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00.

4.1.04.05.01 Jasa Giro Kas Daerah

Realisasi Jasa Giro Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.020.880.769,81 atau 86,31 % dari anggaran senilai Rp3.500.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp2.418.099.359,02.

4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Realisasi Penempatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp3.062.500.602,34 atau 204,17 % dari anggaran senilai Rp1.500.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp2.692.979.452,06

4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2023 dan 2022 Realisasi Tahun 2023 senilai Rp2.583.961.164,90 dan Tahun 2022 senilai Rp1.359.584.287,73, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.500.000.000,00	2.583.961.164,90	103,36	1.359.584.287,73
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	690.950.547,60	0,00	441.545.426,66
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.893.010.617,21	75,72	918.038.861,07

4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp690.950.547,69 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp441.545.426,66.

4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.893.010.617,21 atau 75,72 % dari anggaran senilai Rp2.500.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp918.038.861,07.

4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp23.917.396,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp28.266.747,00

4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp43.591.246,45 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp12.457.575,26

4.1.04.12. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.714.298.499,80 atau 155,85 % dari anggaran senilai Rp1.100.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.112.483.771,00 dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.100.000.000,00	1.714.298.499,80	155,85	1.112.483.771,00
Pendapatan Denda Pajak Hotel	6.600.000,00	8.616.819,00	130,56	9.341.559,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	140.000.000,00	157.672.226,00	112,62	35.686.186,00
Pendapatan Denda Pajak Hiburan	4.315.000,00	4.412.088,00	102,25	198.897,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	18.300.000,00	18.487.955,00	101,03	127.573.543,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	5.400.000,00	6.293.919,00	116,55	9.975.833,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	13.300.000,00	13.773.714,00	103,56	31.687.421,00
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	909.925.000,00	1.502.881.778,80	165,17	898.020.332,00
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00

4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hotel sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp8.616.819,00 atau 130,56 % dari anggaran senilai Rp6.600.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp9.341.559,00

4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Restoran sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp157.672.226,00 atau 112,62 % dari anggaran senilai Rp140.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp35.686.186,00

4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Hiburan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp4.412.088,00 atau 102,25 % dari anggaran senilai Rp4.315.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp198.897,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak	4.315.000,00	4.412.088,00	102,25	198.897,00
Hiburan				
Pendapatan Denda Pajak Pagelaran	1.000.000,00	1.049.164,00	104,92	0,00
Kesenian/Musik/Tari/Busana				
Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	41.000,00	11.158,00	27,21	26.617,00
Ketangkasan				
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan	3.200.000,00	3.271.566,00	102,24	41.600,00
Ketangkasan				
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	74.000,00	80.200,00	108,38	130.680,00

4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp18.487.955,00 atau 101,03 % dari anggaran senilai Rp18.300.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp127.573.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Denda Pajak Reklame	18.300.000,00	18.487.955,00	101,03	127.573.543,00
Papan/ Billboard/Videotron/ Megatron				
Pendapatan Denda Pajak Reklame	18.300.000,00	18.487.955,00	101,03	127.543.783,00
Reklame Kain				
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	29.760,00

4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Parkir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp6.293.919,00 atau 116,55 % dari anggaran senilai Rp5.400.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp9.975.833,00.

4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp13.773.714,00 atau 103,56 % dari anggaran senilai Rp13.300.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp31.687.421,00.

4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.502.881.778,80,00 atau 165,17 % dari anggaran senilai Rp909.925.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp898.020.332,00.

4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.160.000,00 atau 100,00 % dari anggaran senilai Rp2.160.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.13.01 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Realisasi Pendapatan Denda Denda Retribusi Jasa Umum sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp2.104.300,00 atau 105,22 % dari anggaran senilai Rp2.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Reklame sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp127.220.624,00 atau 267,95 % dari anggaran senilai Rp47.480.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp226.765.500,80 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan dari Pengembalian	47.480.000,00	127.220.624,00	267,95	226.765.500,80
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	118.801.104,00	0,00	226.765.500,80
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	599.520,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.000.000,00	7.820.000,00	16,64	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	480.000,00	0,00	0,00	0,00

4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp118.801.104,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp226.765.500,80

4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp599.520,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.15.10 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran TPP

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran TPP sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp7.820.000,00 atau 16,64 % dari anggaran senilai Rp47.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian-Kelebihan Pembayaran Barang Jasa

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Barang Jasa sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00

4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp231.002.133.297,07 atau 128,33 % dari anggaran senilai Rp180.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp209.717.327.649,25

4.1.04.18.01 Pendapatan JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan JKN pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp18.448.371.739,00 atau 92,71 % dari anggaran senilai Rp19.900.000.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp15.038.635.111,00

4.1.04.23.01 Pendapatan Hasil Perjanjian/ Kontrak

Realisasi Pendapatan Hasil Perjanjian/Kontrak sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.537.223.372,50 atau 0,00 % dari anggaran senilai Rp0,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 Rp0,00 merupakan Penerimaan (PFK) Jabong Tahun Lalu.

4.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.085.034.990.120,00	1.055.252.997.894,00	97,26	940.653.144.466,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.192.111.882,00	115.977.659.359,00	91,18	110.989.044.199,00
Jumlah	1.212.227.102.002,00	1.171.230.657.253,00	96,62	1.051.642.188.665,00

4.2.1.01. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan

direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

- 1) Rincian Saldo Transfer Pusat -Dana Perimbangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Bagi Hasil	163.169.503.120,00	143.574.223.905,00	87,99	145.384.257.364,00
Dana Alokasi Umum	616.367.887.000,00	621.774.459.000,00	100,88	565.895.019.524,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.894.932.000,00	89.596.603.839,00	91,52	37.158.655.089,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	157.473.584.000,00	151.206.070.231,00	96,02	138.043.848.489,00
Jumlah	1.034.905.906.120,00	1.006.151.356.975,00	97,22	886.481.780.466,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Dana Perimbangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Terhadap realisasi dana transfer telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya:
 1. Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang rincian APBN 2023
 2. PMK tentang bagi hasil kurang bayar dan lebih bayar tahun 2023. Terhadap tinggi rendahnya penerimaan disebabkan karena Dana DAK Fisik Transfer ke Daerah disesuaikan dengan data kontrak sehingga terdapat kecenderungannya realisasi Dana DAK lebih rendah dari pagu anggaran
- 2) Terhadap bagi hasil dari pemerintah pusat realisasi lebih kecil dari pagu hal ini disebabkan transfer pemerintah pusat menyesuaikan dengan penerimaan pemerintah pusat.

4.2.01.01.01 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp143.574.223.905,00 atau 87,99%, dari target yang ditetapkan senilai Rp163.169.503.120,00. Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Saldo Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.167.859.839,00	2.652.198.220,00	122,34	5.835.346.675,00
DBH PPh Pasal 21	32.973.564.097,00	29.421.429.334,00	89,23	24.882.584.068,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.384.928.638,00	5.981.999.919,00	176,72	9.073.824.165,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	75.427.945.131,00	77.354.293.547,00	102,55	53.073.495.851,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara – <i>Royalty</i>	48.139.869.484,00	26.628.033.453,00	55,31	50.474.651.018,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan - Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	58.371.265,00	50.571.221,00	86,64	86.044.587,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.016.964.666,00	1.485.698.211,00	146,09	1.958.311.000,00
Jumlah	163.169.503.120,00	143.574.223.905,00	87,99	145.384.257.364,00

Dana Bagi Hasil yang diterima pada TA 2023 senilai Rp143.574.223.905, **telah** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Tentang Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023; dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF).

4.2.01.01.02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum Tahun 2023 terealisasi senilai Rp621.774.459.000,00 atau 100,88%, dari target yang ditetapkan senilai Rp616.367.887.000,00,realisasi lebih tinggi senilai Rp5.405.572.000 yang merupakan dana DAU Tambahan THR ASN. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

Rincian Saldo Dana Alokasi Umum yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAU Tidak Ditentukan penggunaannya	587.373.327.000,00	592.779.899.000,00	100,92	565.895.019.524,00
DAU Penggajian Formasi PPPK	18.994.560.000,00	18.994.560.000,00	100,00	0,00
DAU Pendanaan Kelurahan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	616.367.887.000,00	621.774.459.000,00	100,88	565.895.019.524,00

Dana Alokasi Umum yang diterima pada TA 2023 senilai Rp621.774.459.000,00 **telah** sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V Tentang Rincian Dana Alokasi Umum menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023; dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 19 Tahun

2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF).

4.2.01.01.03 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp89.596.603.839,00 atau 91,52%, dari target yang ditetapkan senilai Rp97.894.932.000,00. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	1.037.969.000,00	986.485.000,00	95,04	680.814.550,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	5.341.688.000,00	5.327.940.000,00	99,74	6.322.834.299,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	7.220.646.000,00	6.299.055.000,00	87,24	5.098.543.660,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB	881.516.000,00	805.474.000,00	91,37	0,00
DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler -Perpustakaan Daerah	11.000.000.000,00	13.754.957.619,00	125,05	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Penguatan Intervensi Stunting	9.561.739.000,00	8.886.548.990,00	92,94	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Penugasan - Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	784.918.000,00	746.686.000,00	95,13	1.531.018.624,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler – KB	1.239.606.000,00	945.442.200,00	76,27,0 0	1.353.541.770,00
DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Penugasan - Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	4.414.934.000,00	4.291.462.000,00	97,20	0,00
DAK Fisik - Bidang Pertanian – Penugasan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.395.000.000,00	1.095.000.000,00	78,49	0,00
DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan -Penugasan	1.380.000.000,00	1.677.921.926,00	121,59	0,00
DAK Fisik - Bidang Pariwisata - Penugasan	10.739.804.000,00	2.684.951.000,00	25,00	0,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Fisik - Bidang Sanitasi – Reguler	6.962.818.000,00	6.962.800.000,00	100,00	5.074.482.000,00
DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan- Penugasan-Lingkungan Hidup	1.108.434.000,00	1.106.650.000,00	99,84	0,00
DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	34.825.860.000,00	34.025.230.104,00	97,70	2.571.722.099,00
Jumlah	97.894.932.000,00	89.596.603.839,00	91,52	37.158.655.089,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 senilai Rp89.596.603.839,00 sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023. Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023;

4.2.01.01.04 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp150.178.627.150,00 atau 95,37%, dari target yang ditetapkan senilai Rp157.473.584.000,00. Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK Non Fisik - BOS Reguler	61.038.960.000,00	60.613.916.900,00	99,30	60.812.605.545,00
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	2.685.000.000,00	2.685.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik - TPG PNSD	64.307.513.000,00	64.307.511.000,00	100,00	61.169.125.800,00
DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	02.679.750.000,00	1.121.413.115,00	41,85	01.192.950.000,00
DAK Non Fisik - TKG PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - BOP PAUD	5.368.830.000,00	5.067.617.600,00	94,39	3.751.608.000,00
DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan	1.227.590.000,00	1.239.560.000,00	100,98	955.700.000,00
DAK Non Fisik - BOKKB – BOK	8.779.511.000,00	7.128.667.776,00	81,20	4.179.884.842,00
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengawasan Obat dan Makanan	471.614.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - PK2UKM	410.170.000,00	380.373.800,00	92,74	266.040.350,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisata	1.227.371.000,00	1.194.519.050,00	97,32	940.105.800,00
DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal	313.000.000,00	214.874.712,00	68,65	205.574.067,00
DAK Non Fisik - BOKB – KB	5.195.900.000,00	3.510.509.403,00	67,56	3.835.855.122,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
DAK NonFisik - Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	412.531.875,00	94,01	451.800.000,00
DAK NonFisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	579.575.000,00	579.575.000,00	100,00	282.598.963,00
DAK Non Fisik - Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	157.473.584.000,00	150.178.627.150,00	95,37	138.043.848.489,00

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.150.178.627.150,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023;

4.2.1.02. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Dana Insentif Daerah (DID)	44.177.540.000,00	44.177.540.000,00	100,00	54.171.364.000,00
Insentif Fiskal	5.951.544.000,00	5.951.544.000,00	100,00	0,00
Jumlah	50.129.084.000,00	50.129.084.000,00	100,00	54.171.364.000,00

Dana Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya merupakan Dana Insentif Daerah dan Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.50.129.084.000,00, *telah* sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian APBN TA 2023 pada Lampiran V. Tentang Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota TA 2023;

4.2.1.02.01 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.44.177.540.000,00, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Lampiran V. Rincian Alokasi Insentif Fiskal menurut Provins/Kabupaten/Kota TA 2023, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.171.364.000,00

4.2.1.02.01 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal yang diterima pada TA 2023 senilai Rp.5.951.544.000,00, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 130 Tahun 2022 Lampiran V. Rincian Alokasi Insentif Fiskal menurut Provins/Kabupaten/Kota TA 2023, sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00

4.2.02. Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	125.935.866.682,00	114.721.414.159,00	91,10	110.989.044.199,00
Bantuan Keuangan	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	0,00
Jumlah	127.192.111.882,00	115.977.659.359,00	91,18	110.989.044.199,00

Penjelasan:

Dana Transfer Pemerintah Daerah yang bersumber Dana Bagi Hasil Provinsi disesuaikan dengan SK Gubernur pada Tahun 2023.

4.2.02.02.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp114.721.414.159,00 atau 91,10%, dari target yang ditetapkan senilai Rp125.935.866.682,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp110.989.044.199,00

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.883.417.491,00	34.820.864.001,00	99,82	35.836.593.901,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.479.065.418,00	21.146.907.905,00	79,86	25.801.040.355,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.414.522.793,00	32.335.432.893,00	99,76	22.271.925.332,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	42.001.100,00	58.151.495,00	138,45	43.574.220,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	32.116.859.880,00	26.360.057.865,00	82,08	27.035.910.391,00
Jumlah	125.935.866.682,00	114.721.414.159,00	91,10	110.989.044.199,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya di karenakan adanya pembayaran kekurangan Bagi hasil Pajak Tahun 2022

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp114.721.414.159,00 atau 91,10%, dari target yang ditetapkan senilai Rp125.935.866.682,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp110.989.044.199,00.

4.2.02.02 Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bantuan Keuangan khusus dari Pemerintah Pusat	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	,00
Jumlah	1.256.245.200,00	1.256.245.200,00	100,00	0,00

Penjelasan:

Dana Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 900-730 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Khusus Jaminan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023 dan 2022 yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Lain-Lain Pendapatan				
• Pendapatan Hibah	3.750.000.000	3.750.000.000	100,00	2.250.000.000,00
• Pendapatan Dana Darurat				
• Pendapatan atas Dana lainnya	0,00	0,00		58.183.204,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
• Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
Jumlah	3.750.000.000,00	3.750.000.000,00	100,00	2.308.183.204,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut.

- Sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Lampiran V Rincian Hibah Kepada Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2023, dan
- Perjanjian Hibah Daerah (PHD) antaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Mataram untuk Hibah Sanitasi (air limbah setempat) yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN Tahun 2023 Nomor PHD-50/MK.7/DTK.03/ALS/2023 Tanggal 08 Maret 2023

4.3.02.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 terealisasi senilai Rp3.750.000.000,00 atau 100,00%, dari target yang ditetapkan senilai Rp3.750.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp2.250.000.000,00.

4.3.02.01.02 Pendapatan atas Pengembalian Hibah

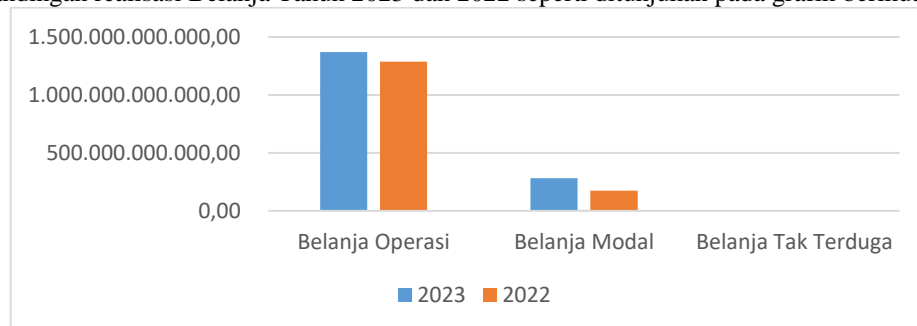
Pendapatan atas Pengembalian Hibah Tahun 2023 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00%, dari target yang ditetapkan senilai Rp0,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp58.183.204,00

5. Belanja Daerah

Berdasarkan Ketentuan Umum Belanja Daerah yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.653.900.067.407,07 atau mencapai 93,70% dari anggaran senilai Rp1.765.190.255.854,00. Realisasi Belanja tahun 2023 meningkat sebesar 12,96% atau senilai Rp189.735.398.551,02 dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.464.164.668.856,05 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47	1.287.767.626.136,05
Belanja Modal	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49	174.005.861.795,00
Belanja Tak Terduga	4.854.874.000,00	34.297.616,00	0,71	879.033.300,00
Belanja Transfer	2.441.350.000,00	2.441.350.000,00	100,00	1.512.147.625,00
Jumlah	1.765.190.255.854,00	1.653.900.067.407,07	93,70	1.464.164.668.856,05

Perbandingan realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan pada grafik berikut.



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Dari realisasi Belanja senilai Rp1.653.900.067.407,07 sudah termasuk realisasi Belanja di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang dicatat dan dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung senilai Rp223.079.427.956,14, Dana JKN senilai Rp18.749.791.094,00 dan Dana BOS Satdikdas Negeri senilai Rp51.996.101.139,12.

5.1 Belanja Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp1.369.444.965.929,07 atau 94,47% dari anggaran senilai Rp1.449.679.971.341,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34	565.614.183.592,00
Belanja Barang dan Jasa	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86	642.421.610.056,05
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27	62.881.075.691,00
Belanja Bantuan Sosial	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10	16.570.993.525,00
Jumlah	1.449.679.971.341,00	1.369.444.965.929,07	94,47	1.287.767.626.136,05

5.1.01 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp582.272.814.082,00 atau 87,34% dari anggaran senilai Rp666.653.876.940,00. Rincian belanja Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	390.151.191.167,00	345.562.332.398,00	88,57	337.443.371.412,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	138.079.704.885,00	112.251.117.079,00	81,29	107.582.035.467,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	98.003.526.451,00	90.314.610.743,00	92,15	81.203.705.580,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.235.836.520,00	22.704.507.365,00	97,71	22.686.885.420,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.038.401.073,00	1.015.808.236,00	97,82	1.055.005.836,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000,00	912.480.000,00	100,00	905.760.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	15.232.736.844,00	9.511.958.261,00	62,44	14.737.419.877,00
Jumlah	666.653.876.940,00	582.272.814.082,00	87,34	565.614.183.592,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Penambahan pegawai dari penerimaan CPNS.
 - b. Mutasi pegawai dari luar Kota Mataram.
 - c. Adanya pegawai yang pensiun dan yang meninggal dunia
 - d. Mutasi pegawai yang keluar dari Kota Mataram
2. Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN senilai Rp345.562.332.398,00 atau 88,57% dari anggaran senilai Rp390.151.191.167,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp337.443.371.412,00. Rincian belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	288.777.670.852,00	261.058.250.555,00	90,40	254.609.086.330,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	28.811.423.293,00	22.764.472.499,00	79,01	22.100.084.154,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	9.191.750.305,00	8.461.385.273,00	92,05	8.679.461.949,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.170.387.727,00	13.632.958.800,00	89,87	13.070.218.580,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.960.239.130,00	5.276.460.301,00	75,81	5.002.415.665,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	17.706.490.765,00	14.577.347.609,00	82,33	14.085.371.202,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.304.483.988,00	735.789.149,00	56,40	800.586.046,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.553.969,00	3.780.217,00	32,72	3.566.641,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	19.441.466.393,00	16.920.573.718,00	87,03	17.016.368.921,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	693.931.186,00	532.828.571,00	76,78	519.052.981,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.081.793.559,00	1.598.485.706,00	76,78	1.557.158.943,00
Jumlah	390.151.191.167,00	345.562.332.398,00	88,57	337.443.371.412,00

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN senilai Rp261.058.250.555,00 atau 90,40% dari anggaran senilai Rp288.777.670.852,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp254.609.086.330,00. Rincian Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	250.484.489.534,00	232.825.228.278,00	92,95	242.597.856.196,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	38.293.181.318,00	28.233.022.277,00	73,73	12.011.230.134,00
Jumlah	288.777.670.852,00	261.058.250.555,00	90,40	254.609.086.330,00

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN senilai Rp22.764.472.499,00 atau 79,01% dari anggaran senilai Rp28.811.423.293,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp22.100.084.154,00. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	23.115.458.031,00	20.383.598.710,00	88,18	21.109.561.416,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.695.965.262,00	2.380.873.789,00	41,80	990.522.738,00
Jumlah	28.811.423.293,00	22.764.472.499,00	79,01	22.100.084.154,00

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan ASN senilai Rp8.461.385.273,00 atau 92,05% dari anggaran senilai Rp9.191.750.305,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp8.679.461.949,00. Rincian Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	9.191.750.305,00	8.461.385.273,00	92,05	8.676.541.949,00
Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00
Jumlah	9.191.750.305,00	8.461.385.273,00	92,05	8.679.461.949,00

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Belanja Tunjangan Fungsional ASN merupakan Belanja Tunjangan Fungsional bagi PNS senilai Rp13.632.958.800,00 atau 89,87% dari anggaran senilai Rp15.170.387.727,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp13.070.218.580,00.

Belanja Tunjangan Fungsional Umum

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN senilai Rp5.276.460.301,00 atau 75,81% dari anggaran senilai Rp6.960.239.130,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.002.415.665,00. Rincian Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.784.438.444,00	3.515.600.301,00	73,48	4.255.475.665,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.175.800.686,00	1.760.860.000,00	80,93	746.940.000,00
Jumlah	6.960.239.130,00	5.276.460.301,00	75,81	5.002.415.665,00

Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN senilai Rp14.577.347.609,00 atau 82,33% dari anggaran senilai Rp17.706.490.765,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp14.085.371.202,00. Rincian Belanja Tunjangan Beras ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras PNS	14.505.455.924,00	12.768.947.789,00	88,03	13.321.122.942,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.201.034.841,00	1.808.399.820,00	56,49	764.248.260,00
Jumlah	17.706.490.765,00	14.577.347.609,00	82,33	14.085.371.202,00

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan Beras PPh/Tunjangan Khusus ASN

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN senilai Rp735.789.149,00 atau 56,40% dari anggaran senilai Rp1.304.483.988,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp800.586.046,00. Rincian Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.250.635.288,00	735.766.682,00	58,83	800.586.046,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	53.848.700,00	22.467,00	0,04	0,00
Jumlah	1.304.483.988,00	735.789.149,00	56,40	800.586.046,00

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN senilai Rp3.780.217,00 atau 32,72% dari anggaran senilai Rp11.553.969,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.566.641,00. Rincian Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.445.856,00	3.357.681,00	39,76	3.390.428,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.108.113,00	422.536,00	13,59	176.213,00
Jumlah	11.553.969,00	3.780.217,00	32,72	3.566.641,00

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN senilai Rp16.920.573.718,00 atau 87,03% dari anggaran senilai Rp19.441.466.393,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp17.016.368.921,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.059.295.554,00	15.540.903.149,00	86,05	16.543.229.468,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.382.170.839,00	1.379.670.569,00	99,82	473.139.453,00
Jumlah	19.441.466.393,00	16.920.573.718,00	87,03	17.016.368.921,00

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN senilai Rp532.828.571,00 atau 76,78% dari anggaran senilai Rp693.931.186,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp519.052.981,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	565.210.617,00	476.896.722,00	84,38	496.255.557,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	128.720.569,00	55.931.849,00	43,45	22.797.424,00
Jumlah	693.931.186,00	532.828.571,00	76,78	519.052.981,00

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN senilai Rp1.598.485.706,00 atau 76,78% dari anggaran senilai Rp2.081.793.559,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.557.158.943,00. Rincian Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.741.465.092,00	1.430.690.162,00	82,15	1.488.766.673,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	340.328.467,00	167.795.544,00	49,30	68.392.270,00
Jumlah	2.081.793.559,00	1.598.485.706,00	76,78	1.557.158.943,00

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN senilai Rp112.251.117.079,00 atau 81,29% dari anggaran senilai Rp138.079.704.885,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp107.582.035.467,00. Rincian Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	51.891.809.912,00	42.505.227.809,00	81,91	42.172.251.936,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	406.410.059,00	269.643.100,00	66,35	143.783.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.732.908.263,00	2.036.100.692,00	74,50	1.984.770.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	83.048.576.651,00	67.440.145.478,00	81,21	63.281.230.531,00
Jumlah	138.079.704.885,00	112.251.117.079,00	81,29	107.582.035.467,00

5.1.01.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN senilai Rp42.505.227.809,00 atau 81,91% dari anggaran senilai Rp51.891.809.912,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp42.172.251.936,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	44.453.325.912,00	39.616.297.950,00	89,12	42.172.251.936,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.438.484.000,00	2.888.929.859,00	38,84	0,00
Jumlah	51.891.809.912,00	42.505.227.809,00	81,91	42.172.251.936,00

5.1.01.02.03 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kondisi Kerja ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS senilai Rp269.643.100,00 atau 66,35% dari anggaran senilai Rp406.410.059,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp143.783.000,00.

5.1.01.02.04 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS senilai Rp2.036.100.692,00 atau 74,50% dari anggaran senilai Rp2.732.908.263,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.984.770.000,00.

5.1.01.02.05 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN senilai Rp67.440.145.478,00 atau 81,21% dari anggaran senilai Rp83.048.576.651,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp63.281.230.531,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	65.826.672.474,00	60.621.846.753,00	92,09	63.281.230.531,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	17.221.904.177,00	6.818.298.725,00	39,59	0,00
Jumlah	83.048.576.651,00	67.440.145.478,00	81,21	63.281.230.531,00

5.1.01.03 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN senilai Rp90.314.610.743,00 atau 92,15% dari anggaran senilai Rp98.003.526.451,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp81.203.705.580,00. Rincian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.653.586.700,00	7.539.486.700,00	98,51	7.368.299.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.764.885.000,00	960.100.000,00	54,40	821.150.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	71.307.023.358,00	69.310.035.060,00	97,20	65.165.535.280,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.679.750.000,00	1.547.337.750,00	57,74	896.369.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	6.869.191.393,00	3.507.767.733,00	51,07	0,00
Belanja Honorarium	7.546.090.000,00	7.270.383.500,00	96,35	6.813.552.300,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	183.000.000,00	179.500.000,00	98,09	138.800.000,00
Jumlah	98.003.526.451,00	90.314.610.743,00	92,15	81.203.705.580,00

5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah ASN
 Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah senilai Rp7.539.486.700,00 atau 98,51% dari anggaran senilai Rp7.653.586.700,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp7.368.299.000,00. Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.172.400.000,00	1.172.400.000,00	100,00	1.082.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.698.318.750,00	1.698.318.750,00	100,00	1.398.600.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	246.122.000,00	246.122.000,00	100,00	176.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	281.250.000,00	167.150.000,00	59,43	204.000.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.817.250.000,00	1.817.250.000,00	100,00	1.834.750.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	105.450.000,00	105.450.000,00	100,00	133.125.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	88.435.950,00	88.435.950,00	100,00	57.999.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.085.490.000,00	1.085.490.000,00	100,00	1.224.225.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.158.870.000,00	1.158.870.000,00	100,00	1.257.350.000,00
Jumlah	7.653.586.700,00	7.539.486.700,00	98,51	7.368.299.000,00

5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah senilai Rp960.100.000,00 atau 54,40% dari anggaran senilai Rp1.764.885.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp821.150.000,00. Rincian Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	328.500.000,00	0,00	0,00	105.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000,00	45.000.000,00	45,00	45.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	514.600.000,00	404.600.000,00	78,62	281.250.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	388.500.000,00	276.000.000,00	71,04	238.500.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	20.000.000,00	40,00	20.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang				
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	36.400.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	126.035.000,00	62.500.000,00	49,59	25.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	100.000.000,00	50,00	0,00
Jumlah	1.764.885.000,00	960.100.000,00	54,40	821.150.000,00

5.1.01.03.03 Belanja TPG PNSD

Realisasi Belanja Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD senilai Rp69.310.035.060,00 atau 97,20% dari anggaran senilai Rp71.307.023.358,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp65.165.535.280,00.

5.1.01.03.05 Belanja Tamsil Guru PNSD

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD senilai Rp1.547.337.750,00 atau 57,74% dari anggaran senilai Rp2.679.750.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp896.369.000,00.

5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN senilai Rp3.507.767.733,00 atau 51,07% dari anggaran senilai Rp6.869.191.393,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium

Realisasi Belanja Honorarium senilai Rp7.270.383.500,00 atau 96,35% dari anggaran senilai Rp7.546.090.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp6.813.552.300,00. Rincian Belanja Honorarium Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.247.380.000,00	6.082.963.500,00	97,37	5.601.090.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	582.460.000,00	493.170.000,00	84,67	386.712.300,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	716.250.000,00	694.250.000,00	96,93	825.750.000,00
Jumlah	7.546.090.000,00	7.270.383.500,00	96,35	6.813.552.300,00

5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD senilai Rp179.500.000,00 atau 98,09% dari anggaran senilai Rp183.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp138.800.000,00. Rincian Belanja Jasa Pengelolaan BMD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	48.000.000,00	45.000.000,00	93,75	45.000.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	135.000.000,00	134.500.000,00	99,63	93.800.000,00
Jumlah	183.000.000,00	179.500.000,00	98,09	138.800.000,00

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD senilai Rp22.704.507.365,00 atau 97,71% dari anggaran senilai Rp23.235.836.520,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp22.686.885.420,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00	892.290.000,00	100,00	890.715.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00	113.017.800,00	90,47	111.600.300,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000,00	122.679.480,00	85,19	122.534.640,00
Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00	76.482.000,00	85,71	76.324.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00	1.293.820.500,00	100,00	1.291.536.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	126.069.000,00	125.788.950,00	99,78	124.510.050,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250,00	41.305.425,00	37,84	53.394.075,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00	7.056.000.000,00	100,00	7.041.300.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000,00	1.764.000.000,00	100,00	1.764.000.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	416.058.186,00	17.353.322,00	4,17	17.324.237,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.114.165.984,00	6.095.769.888,00	99,70	6.082.920.868,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.106.000.000,00	5.106.000.000,00	100,00	5.106.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	0,00	0,00	4.725.000,00
Jumlah	23.235.836.520,00	22.704.507.365,00	97,71	22.686.885.420,00

5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp892.290.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp892.290.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp890.715.000,00.

5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga DPRD senilai Rp113.017.800,00 atau 90,47% dari anggaran senilai Rp124.920.600,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp111.600.300,00.

5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Beras DPRD senilai Rp122.679.480,00 atau 85,19% dari anggaran senilai Rp144.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp122.534.640,00.

5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp76.482.000,00 atau 85,71% dari anggaran senilai Rp89.229.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp76.324.500,00.

5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan DPRD senilai Rp1.293.820.500,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.293.820.500,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.291.536.750,00.

5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD senilai Rp125.788.950,00 atau 99,78% dari anggaran senilai Rp126.069.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp124.510.050,00.

5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD senilai Rp41.305.425,00 atau 37,84% dari anggaran senilai Rp109.163.250,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp53.394.075,00.

5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp7.056.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp7.056.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp7.041.300.000,00.

5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Reses DPRD senilai Rp1.764.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.764.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.764.000.000,00.

5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp17.353.322,00 atau 4,17% dari anggaran senilai Rp416.058.186,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp17.324.237,00.

5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Realisasi Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD senilai Rp6.095.769.888,00 atau 99,70% dari anggaran senilai Rp6.114.165.984,00. Sedangkan

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.000.000,00	78.827.616,00	82,11	78.478.596,00
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.141.496,00	1.835.568,00	85,71	1.835.568,00
Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.424.488,00	5.506.704,00	85,71	5.506.704,00
Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.009.600.000,00	6.009.600.000,00	100,00	5.997.100.000,00
Jumlah	6.114.165.984,00	6.095.769.888,00	99,70	6.082.920.868,00

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp5.106.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp5.106.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.106.000.000,00.

5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Realisasi Belanja Uang Representasi DPRD senilai Rp5.106.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp5.106.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp5.106.000.000,00.

5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD untuk tahun 2023 tidak dianggarkan atau Rp.0,00 Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.725.000,00.

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH senilai Rp1.015.808.236,00 atau 97,82% dari anggaran senilai Rp1.038.401.073,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.055.005.836,00. Rincian Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	100,00	7.644.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.100,00	7.531.680,00	92,86	6.952.320,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.467.626,00	854.556,00	58,23	827.556,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.280,00	1.000,00	78,13	960,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	333.363,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	416.704,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	857.547.000,00	836.897.000,00	97,59	886.701.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.038.401.073,00	1.015.808.236,00	97,82	1.055.005.836,00

5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH senilai Rp54.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp54.600.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.600.000,00.

5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH senilai Rp7.644.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp7.644.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp7.644.000,00.

5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH senilai Rp98.280.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp98.280.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp98.280.000,00.

5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH senilai Rp7.531.680,00 atau 92,86% dari anggaran senilai Rp8.111.100,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp6.952.320,00

5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH senilai Rp854.556,00 atau 58,23% dari anggaran senilai Rp1.467.626,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp827.556,00.

5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH senilai Rp1.000,00 atau 78,13% dari anggaran senilai Rp1.280,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp960,00.

5.1.01.05.10 Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah senilai Rp836.897.000,00 atau 97,59% dari anggaran senilai Rp857.547.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp886.701.000,00. Rincian Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	117.750.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	185.757.450,00	185.757.450,00	100,00	151.400.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	22.278.000,00	22.278.000,00	100,00	24.000.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	23.750.000,00	3.100.000,00	13,05	36.000.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	276.500.000,00	276.500.000,00	100,00	215.250.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	15.250.000,00	15.250.000,00	100,00	16.875.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.131.550,00	8.131.550,00	100,00	7.001.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	138.950.000,00	138.950.000,00	100,00	175.775.000,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	106.930.000,00	106.930.000,00	100,00	142.650.000,00
Jumlah	857.547.000,00	836.897.000,00	97,59	886.701.000,00

5.1.01.05.11 Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah merupakan Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing senilai Rp10.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp10.000.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp0,00.

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH senilai Rp912.480.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp912.480.000,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp905.760.000,00. Rincian Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	100,00	305.760.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Jumlah	912.480.000,00	912.480.000,00	100,00	905.760.000,00

5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD senilai Rp9.511.958.261,00 atau 62,44% dari anggaran senilai Rp15.232.736.844,00. Sedangkan realisasi Tahun 2022 senilai Rp14.737.419.877,00.

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 senilai Rp677.683.569.029,07 atau 101,86% dari anggaran senilai Rp665.304.338.554,00 sudah termasuk realisasi Belanja Barang/Jasa BLUD senilai Rp200.400.041.853,14 dari anggaran sebesar Rp146.942.054.739,00 atau 136,38% yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah, serta Belanja Barang dan Jasa JKN senilai Rp17.216.959.756,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp42.604.999.381,93. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	131.137.552.755,00	120.636.882.877,00	91,99	118.443.292.480,00
Belanja Jasa	271.325.601.585,00	254.421.305.976,00	93,77	243.829.612.718,00
Belanja Pemeliharaan	20.785.643.203,00	19.428.914.871,00	93,47	15.806.598.217,00
Belana Perjalanan Dinas	42.902.447.695,00	36.574.933.905,00	85,25	33.912.019.243,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.435.751.513,00	3.616.490.165,00	81,53	4.504.606.400,00
Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)				
Belanja Barang dan Jasa BOS	47.775.287.064,00	42.604.999.381,93	89,18	41.988.173.720,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP				
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas				
Belanja Barang dan Jasa BLUD	146.942.054.739,00	200.400.041.853,14	136,38	183.937.307.278,05
Jumlah	665.304.338.554,00	677.683.569.029,07	101,86	642.421.610.056,05

Penjelasan:

1. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 senilai Rp677.683.569.029,07 atau 101,86% dari anggaran senilai Rp665.304.338.554,00 sudah termasuk realisasi Belanja Barang/Jasa BLUD senilai Rp200.400.041.853,14 dari anggaran sebesar Rp146.942.054.739,00 atau

136,38% yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah, serta Belanja Barang dan Jasa JKN senilai Rp17.216.959.756,00 dan Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp42.604.999.381,93. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023.

2. Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.1.02.01 Belanja Barang

Belanja Barang Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp120.636.882.877,00 atau 91,99% dari anggaran senilai Rp131.137.552.755,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	130.811.155.824,00	120.311.397.752,00	91,97	118.191.423.595,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	326.396.931,00	325.485.125,00	99,72	251.868.885,00
Jumlah	131.137.552.755,00	120.636.882.877,00	91,99	118.443.292.480,00

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang Pakai Habis Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp120.311.397.752,00 atau 91,97% dari anggaran senilai Rp130.811.155.824,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp118.191.423.595,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.150.182.177,00	1.080.265.235,00	93,92	971.402.544,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	958.043.875,00	637.640.512,00	66,56	2.524.710.937,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.388.634.005,00	13.748.107.941,00	95,55	13.620.599.778,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	741.630.000,00	690.230.000,00	93,07	15.959.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	770.301.500,00	712.363.000,00	92,48	578.745.500,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	56.850.000,00	46.260.250,00	81,37	45.078.750,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	54.941.000,00	32.162.000,00	58,54	25.666.775,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.187.297.785,00	6.427.321.694,00	89,43	5.521.067.437,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.820.197.000,00	1.750.256.172,00	96,16	1.361.719.434,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	141.000.000,00	121.829.615,00	86,40	249.285.033,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	8.273.400,00	2.703.500,00	32,68	5.789.635,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	14.581.071,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	9.120.000,00	9.088.000,00	99,65	12.650.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.864.500,00	11.864.500,00	100,00	11.565.000,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	723.153.800,00	699.604.462,00	96,74	1.015.690.632,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.090.748.292,00	3.588.004.966,00	87,71	3.431.441.613,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.440.154.576,00	2.236.569.833,00	91,66	1.915.540.579,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.558.831.338,00	7.570.923.647,00	88,46	6.946.030.415,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	244.091.300,00	228.578.600,00	93,64	220.571.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	281.650.000,00	252.140.750,00	89,52	205.560.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.122.414.866,00	1.944.103.802,00	91,60	1.862.959.531,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.063.023.108,00	1.891.127.032,00	91,67	2.030.299.544,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.230.913.384,00	1.144.570.278,00	92,99	497.438.080,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	321.024.000,00	299.511.730,00	93,30	276.316.800,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	31.410.000,00	31.410.000,00	100,00	13.420.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	637.009.400,00	549.971.000,00	86,34	592.157.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.329.149.733,00	4.140.043.871,00	77,69	2.162.632.445,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	8.776.389.712,00	8.270.746.004,00	94,24	17.845.880.133,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	217.154.832,00	158.685.440,00	73,07	112.382.936,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	34.247.499.771,00	33.547.781.015,00	97,96	30.129.204.043,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	74.542.640,00	64.828.618,00	86,97	1.063.298.370,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.535.772.040,00	1.985.109.500,00	78,28	872.425.450,00
Belanja Natura dan Pakan-Pakan	148.375.265,00	148.371.040,00	100,00	130.237.000,00
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	767.804.000,00	50.000.000,00	6,51	99.960.000,00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan	0,00	0,00	0,00	98.580.000,00
Belanja Persediaan Penelitian Lainnya				
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.362.946.750,00	20.330.251.558,00	90,91	15.543.779.950,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.786.650.000,00	1.767.270.547,00	98,92	1.756.764.730,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00	3.840.000,00
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.167.550.000,00	1.117.500.000,00	95,71	970.471.300,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	783.135.000,00	659.431.000,00	84,20	384.175.000,00
Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	120.000.000,00	119.969.000,00	99,97	111.976.800,00
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	45.100.000,00	45.100.000,00	100,00	157.800.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	274.330.000,00	92.000.000,00	33,54	320.459.000,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	291.005.000,00	290.938.640,00	99,98	674.597.475,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	68.000.000,00	67.920.000,00	99,88	63.936.000,00
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.640.000,00	16.620.000,00	99,88	35.040.000,00
Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	84.875.500,00
Belanja Pakaian Siaga	141.199.775,00	140.265.000,00	99,34	15.614.000,00
Belanja Pakaian Teknik	19.775.000,00	18.025.000,00	91,15	70.619.325,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	75.729.000,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	247.600.000,00	247.404.000,00	99,92	63.025.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	515.889.500,00	505.824.000,00	98,05	525.401.500,00
Belanja Pakaian Olahraga	661.447.500,00	650.265.000,00	98,31	768.411.750,00
Belanja Pakaian Paskibraka	60.120.000,00	60.120.000,00	100,00	62.460.000,00
Jumlah	130.811.155.824,00	120.311.397.752,00	91,97	118.191.423.595,00

5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai

Belanja Barang Tak Habis Pakai Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp325.485.125,00 atau 99,72% dari anggaran senilai Rp326.396.931,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp251.868.885,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Komponen-Komponen Peralatan	95.155.000,00	95.155.000,00	100,00	0,00
Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	209.447.829,00	208.934.800,00	99,76	227.096.200,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	18.139.102,00	17.824.325,00	98,26	24.022.685,00
Belanja Pipa-Pipa Baja	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	3.655.000,00	3.571.000,00	97,70	0,00
Jumlah	326.396.931,00	325.485.125,00	99,72	251.868.885,00

5.1.02.02 Belanja Jasa

Belanja Jasa Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp254.421.305.976,00 atau 93,77% dari anggaran senilai Rp271.325.601.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	214.504.806.905,00	205.290.484.884,00	95,70	200.054.313.987,00
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	38.398.160.633,00	34.209.142.286,00	89,09	22.871.625.917,00
Belanja Sewa Tanah	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.070.516.909,00	2.769.814.498,00	90,21	1.542.697.474,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.385.268.000,00	3.147.077.000,00	92,96	3.378.090.300,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20.765.133,00	20.765.133,00	100,00	12.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	229.750.000,00	203.250.000,00	88,47	431.620.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.375.639.705,00	2.647.404.576,00	60,50	4.750.077.615,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.418.065.000,00	3.001.172.299,00	87,80	3.628.304.782,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	3.222.763.543,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	125.000.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.030.013.000,00	2.465.679.000,00	81,38	3.633.119.100,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	423.866.300,00	421.116.300,00	99,35	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	435.400.000,00	215.400.000,00	49,47	180.000.000,00
Jumlah	271.325.601.585,00	254.421.305.976,00	93,77	243.829.612.718,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp205.290.484.884,00 atau 95,70% dari anggaran senilai Rp214.504.806.905,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp200.054.313.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	61.200.000,00	61.050.000,00	99,75	99.584.000,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.619.760.000,00	4.624.566.053,00	82,29	4.235.361.500,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.619.950.000,00	28.301.705.252,00	92,43	32.189.698.000,00
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	440.800.000,00	396.000.000,00	89,84	412.400.000,00
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.459.200.000,00	1.441.790.000,00	98,81	185.300.000,00
Honorarium Rohaniwan	14.400.000,00	9.150.000,00	63,54	8.000.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	257.880.000,00	257.880.000,00	100,00	345.060.000,00
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	14.400.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	826.950.000,00	811.350.000,00	98,11	244.125.000,00
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	828.400.000,00	729.200.000,00	88,03	702.900.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.335.720.000,00	7.320.000.000,00	99,79	9.903.960.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	27.759.004.335,00	27.478.471.702,00	98,99	14.016.832.602,00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	64.800.000,00	64.800.000,00	100,00	68.625.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.117.641.254,00	8.533.133.854,00	93,59	7.682.886.550,00
Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.053.227.500,00	3.004.807.500,00	98,41	4.211.381.250,00
Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.058.400.000,00	1.058.400.000,00	100,00	1.058.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2.340.400.000,00	2.340.400.000,00	100,00	2.207.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.735.871.500,00	1.718.374.500,00	98,99	8.765.787.500,00
Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	396.000.000,00	395.250.000,00	99,81	396.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	8.276.677.600,00	7.383.159.531,00	89,20	8.008.305.006,00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	113.400.000,00	113.400.000,00	100,00	129.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	278.446.000,00	258.558.000,00	92,86	53.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	92.130.000,00	84.630.000,00	91,86	120.650.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9.164.700.000,00	9.087.075.000,00	99,15	8.435.557.500,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.017.350.000,00	2.004.620.000,00	99,37	1.447.500.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.675.250.000,00	17.652.727.500,00	99,87	17.976.210.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.520.934.000,00	2.259.179.000,00	89,62	2.041.614.308,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.689.146.000,00	18.633.516.988,00	99,70	17.955.258.678,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.670.800.000,00	4.636.300.000,00	99,26	3.273.300.000,00
Belanja Jasa Tenaga Caraka	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00	81.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	2.383.200.000,00	2.376.150.000,00	99,70	1.591.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	268.238.250,00	133.650.000,00	49,83	145.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	501.000.000,00	501.000.000,00	100,00	272.900.000,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	163.550.000,00	145.500.000,00	88,96	72.125.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	94.800.000,00	93.300.000,00	98,42	41.850.000,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	50.200.000,00
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	24.524.050,00	23.954.050,00	97,68	2.985.500,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	495.000.000,00	303.918.000,00	61,40	306.234.000,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	30.000.000,00	29.859.000,00	99,53	105.700.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.864.679.670,00	1.849.630.650,00	99,19	1.078.010.000,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	160.000.000,00
Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	46.014.950,00	38.958.000,00	84,66	51.990.900,00
Belanja Jasa Kalibrasi	77.768.280,00	72.039.674,00	92,63	52.574.724,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	751.237.800,00	377.868.103,00	50,30	2.280.112.000,00
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	383.070.000,00	331.870.000,00	86,63	305.320.000,00
Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.473.189.175,00	2.299.919.775,00	92,99	1.915.400.707,00
Belanja Tagihan Telepon	190.982.000,00	158.839.886,00	83,17	176.527.269,00
Belanja Tagihan Air	1.009.562.250,00	670.640.776,00	66,43	585.422.294,00
Belanja Tagihan Listrik	30.286.259.214,00	29.788.146.855,00	98,36	3.240.595.936,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.830.600,00	757.958.700,00	84,14	698.721.620,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.400.344.500,00	4.016.313.637,00	91,27	3.246.198.475,00
Belanja Paket/Pengiriman	36.265.000,00	17.608.400,00	48,55	156.422.850,00
Belanja Penambahan Daya	32.500.000,00	13.504.500,00	41,55	22.804.545,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	807.620.577,00	493.864.948,00	61,15	399.539.757,00
Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	5.000.000.000,00	4.999.990.000,00	100,00	31.075.285.846,00
Belanja Pengolahan Air Limbah	24.242.400,00	7.102.200,00	29,30	1.020.000,00
Belanja Lembur	5.425.690.000,00	4.858.689.500,00	89,55	4.194.475.000,00
Belanja Medical Check Up	96.400.000,00	21.313.350,00	22,11	73.340.670,00
Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	0,00	0,00	1.469.210.000,00
Jumlah	214.504.806.905,00	205.290.484.884,00	95,70	200.054.313.987,00

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp34.209.142.286,00 atau 89,09% dari anggaran senilai Rp38.398.160.633,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp22.871.625.917,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	27.531.000.000,00	26.827.045.000,00	97,44	19.925.080.000,00
Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.058.272.000,00	2.972.090.900,00	97,18	2.129.958.600,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.893.015.829,00	467.618.268,00	16,16	4.497.994,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	526.874.200,00	400.272.245,00	75,97	358.201.942,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	869.056.761,00	511.236.093,00	58,83	453.887.381,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	3.519.941.843,00	3.030.879.780,00	86,11	0,00
Jumlah	38.398.160.633,00	34.209.142.286,00	89,09	22.871.625.917,00

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.769.814.498,00 atau 90,21% dari anggaran senilai Rp3.070.516.909,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.542.697.474,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	60.000.000,00	30.000.000,00	50,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	212.830.000,00	154.180.000,00	72,44	103.330.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00
Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.040.676.000,00	1.919.214.298,00	94,05	729.646.500,00
Belanja Sewa Mebel	30.170.000,00	30.170.000,00	100,00	59.045.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	194.717.000,00
Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	186.750.000,00	186.750.000,00	100,00	213.550.000,00
Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	44.588.974,00
Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	237.240.909,00	199.750.200,00	84,20	22.300.000,00
Belanja Sewa Peralatan Bantu	189.000.000,00	186.000.000,00	98,41	0,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	31.250.000,00	31.250.000,00	100,00	31.250.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	0,00	0,00	0,00	750.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	45.000.000,00	25.000.000,00	55,56	0,00
Jumlah	3.070.516.909,00	2.769.814.498,00	90,21	1.542.697.474,00

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp3.147.077.000,00 atau 92,96% dari anggaran senilai Rp3.385.268.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.378.090.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	274.600.000,00	274.600.000,00	100,00	341.200.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	50.600.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	832.852.000,00	774.617.000,00	93,01	1.398.060.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	76.248.900,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.600.000,00	10.300.000,00	97,17	12.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Terbuka	94.000.000,00	84.500.000,00	89,89	141.460.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41.625.000,00	39.550.000,00	95,02	62.750.000,00
Belanja Sewa Bangunan Parkir	24.000.000,00	17.540.000,00	73,08	0,00
Belanja Sewa Taman	168.350.000,00	166.720.000,00	99,03	16.000.000,00
Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00	28.200.000,00
Belanja Sewa Hotel	1.939.241.000,00	1.779.250.000,00	91,75	1.251.071.400,00
Jumlah	3.385.268.000,00	3.147.077.000,00	92,96	3.378.090.300,00

5.1.02.02.06 Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp20.765.133,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp20.765.133,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	18.465.133,00	18.465.133,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	12.000.000,00
Jumlah	20.765.133,00	20.765.133,00	100,00	12.000.000,00

5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp203.250.000,00 atau 88,47% dari anggaran senilai Rp229.750.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp431.620.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Sewa Audio Visual	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00	252.000.000,00
Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	199.000.000,00	197.500.000,00	99,25	1.500.000,00
Belanja Sewa Tanaman	0,00	0,00	0,00	153.120.000,00
Jumlah	229.750.000,00	203.250.000,00	88,47	431.620.000,00

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.647.404.576,00 atau 60,50% dari anggaran senilai Rp4.375.639.705,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.750.077.615,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	200.000.000,00	99.580.000,00	49,79	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	173.500.000,00	172.280.000,00	99,30	538.615.963,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	420.703.372,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	649.830.000,00	634.337.000,00	97,62	196.795.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa	0,00	0,00	0,00	59.624.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan				
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	135.000.000,00	133.671.750,00	99,02	424.867.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	70.000.000,00	66.919.000,00	95,60	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0,00	0,00	0,00	37.610.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00	0,00	81.160.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	101.500.000,00	100.711.800,00	99,22	1.029.239.500,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	500.200.000,00	99.250.000,00	19,84	367.194.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	514.734.000,00	0,00	0,00	119.907.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	78.500.000,00	77.425.000,00	98,63	11.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	281.400.000,00	90.937.000,00	32,32	225.922.767,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00	99.255.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	389.588.000,00	2.250.000,00	0,58	2.700.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	19.823.705,00	15.817.126,00	79,79	13.536.113,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	736.000.000,00	636.076.000,00	86,42	1.061.650.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	48.984.300,00	97,97	49.772.400,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	475.564.000,00	469.165.600,00	98,65	10.325.000,00
Jumlah	4.375.639.705,00	2.647.404.576,00	60,50	4.750.077.615,00

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultasi dan Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp3.001.172.299,00 atau 87,80% dari anggaran senilai Rp3.418.065.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.628.304.782,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	75.000.000,00	73.780.000,00	98,37	426.313.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	0,00	74.500.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	87.000.000,00	6.499.300,00	7,47	170.583.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	509.565.000,00	306.312.500,00	60,11	423.961.956,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	1.010.000.000,00	1.003.701.000,00	99,38	897.817.826,00
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.537.500.000,00	1.412.606.999,00	91,88	1.387.529.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	99.000.000,00	98.700.500,00	99,70	247.600.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataan	100.000.000,00	99.572.000,00	99,57	0,00
Jumlah	3.418.065.000,00	3.001.172.299,00	87,80	3.628.304.782,00

5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp30.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp30.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp125.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
Jumlah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	125.000.000,00

5.1.02.02.12 Belanja Kursus /Pelatihan Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.465.679.000,00 atau 81,38% dari anggaran senilai Rp3.030.013.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.633.119.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		520.878.000,00		
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	724.653.000,00		71,88	693.354.100,00
Belanja Sosialisasi	899.560.000,00	757.761.000,00	84,24	1.298.090.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.405.800.000,00	1.187.040.000,00	84,44	1.132.400.000,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	0,00	0,00	0,00	509.275.000,00
Jumlah	3.030.013.000,00	2.465.679.000,00	81,38	3.633.119.100,00

5.1.02.02.13 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp421.116.300,00 atau 99,35% dari anggaran senilai Rp423.866.300,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	47.600.000,00	47.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	65.923.800,00	65.923.800,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	5.000.000,00	2.250.000,00	45,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	56.250.000,00	56.250.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.432.500,00	3.432.500,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	175.560.000,00	175.560.000,00	100,00	0,00
Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea	59.200.000,00	59.200.000,00	100,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah	423.866.300,00	421.116.300,00	99,35	0,00

5.1.02.02.14 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp215.400.000,00 atau 49,47% dari anggaran senilai Rp435.400.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp180.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000,00	180.000.000,00	45,00	180.000.000,00
Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	0,00
Jumlah	435.400.000,00	215.400.000,00	49,47	180.000.000,00

5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp19.428.914.871,00 atau 93,47% dari anggaran senilai Rp20.785.643.203,00 Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.806.598.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah	975.000.000,00	973.021.000,00	99,80	1.761.955.500,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.130.629.068,00	10.964.624.843,00	90,39	9.408.043.789,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.884.314.135,00	6.723.381.028,00	97,66	4.310.249.193,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	312.800.000,00	285.488.000,00	91,27	326.349.735,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	482.900.000,00	482.400.000,00	99,90	0,00
Jumlah	20.785.643.203,00	19.428.914.871,00	93,47	15.806.598.217,00

5.1.02.03.01 Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja pemeliharaan Tanah tahun 2023 direalisasikan senilai Rp973.021.000,00 atau 99,80% dari anggaran senilai Rp.975.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.1.761.955.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	975.000.000,00	973.021.000,00	99,80	1.761.955.500,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	975.000.000,00	973.021.000,00	99,80	1.761.955.500,00

5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp10.964.624.843,00 atau 90,39% dari anggaran senilai Rp12.130.629.068,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp9.408.043.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	10.000.000,00	2.770.000,00	27,70	2.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	69.000.000,00	58.377.000,00	84,60	77.900.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	2.000.000,00	1.539.500,00	76,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	138.430.000,00	104.378.700,00	75,40	99.881.400,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	6.000.000,00	5.098.500,00	84,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.309.975.200,00	2.150.366.770,00	93,09	1.888.806.180,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.366.152.000,00	2.193.318.759,00	92,70	2.031.911.298,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	306.275.550,00	303.475.550,00	99,09	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.373.083.000,00	1.163.761.110,00	84,76	905.347.222,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.196.850.000,00	1.154.153.721,00	96,43	1.374.312.815,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	30.000.000,00	29.955.000,00	99,85	137.132.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	624.760.000,00	552.907.126,00	88,50	581.939.539,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung	84.000.000,00	78.794.500,00	93,80	0,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bermotor-Alat Angkutan Apung				
Bermotor untuk Penumpang				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Bermesin-Perkakas	6.000.000,00	5.812.600,00	96,88	0,00
Bengkel Kayu				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Bermesin-Alat Bengkel	86.250.000,00	86.162.000,00	99,90	0,00
Bermesin Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Tak Bermesin-Perkakas	0,00	0,00	0,00	12.674.400,00
Bengkel Listrik				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat				
Bengkel Tak Bermesin-Peralatan	0,00	0,00	0,00	2.534.000,00
Tukang Kayu				
Belanja Pemeliharaan Alat				
Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-				
Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	149.871.436,00
Belanja Pemeliharaan Alat				
Pertanian-Alat Pengolahan-Alat				
Pengolahan Tanah dan Tanaman	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat				
Pertanian-Alat Pengolahan-Alat				
Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	10.200.000,00	6.765.000,00	66,32	3.375.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Mesin Hitung/Mesin Jumlah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	1.500.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Alat Reproduksi (Penggandaan)				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-				
Alat Kantor Lainnya	339.700.000,00	280.126.000,00	82,46	90.347.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Mebel	72.850.000,00	19.300.000,00	26,49	42.955.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Alat Pembersih	26.950.000,00	20.646.000,00	76,61	24.785.748,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Alat Pendingin	325.365.500,00	271.438.750,00	83,43	200.662.700,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor				
dan Rumah Tangga-Alat Rumah				
Tangga-Alat Rumah Tangga				
Lainnya (Home Use)	197.440.000,00	122.045.650,00	61,81	160.645.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2.500.000,00	1.875.000,00	75,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	250.000,00	250.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.750.000,00	4.000.000,00	51,61	2.050.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	35.550.000,00	9.605.358,00	27,02	7.026.475,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	26.573.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	521.457.500,00	429.244.707,00	82,32	297.138.800,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	102.120.000,00	81.455.330,00	79,76	1.000.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	186.310.000,00	166.779.916,00	89,52	175.013.890,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	60.000.000,00	59.900.000,00	99,83	182.540.900,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	14.575.000,00	13.798.648,00	94,67	72.784.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya	8.000.000,00	7.924.000,00	99,05	0,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	644.000.000,00	632.477.000,00	98,21	742.709.620,00
Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	800.585.318,00	784.189.648,00	97,95	51.825.866,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	100.000.000,00	99.733.000,00	99,73	0,00
Jumlah	12.130.629.068,00	10.964.624.843,00	90,39	9.408.043.789,00

5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp6.723.381.028,00 atau 97,66% dari anggaran senilai Rp6.884.314.135,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.310.249.193,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.230.867.482,00	4.106.236.028,00	97,05	2.898.395.793,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	2.544.400,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	592.872.000,00	592.872.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	190.000.000,00	189.000.000,00	99,47	388.445.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-	995.845.653,00	993.839.000,00	99,80	52.650.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-	105.180.000,00	103.809.000,00	98,70	0,00
Bangunan Fasilitas Umum				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan	200.000.000,00	199.900.000,00	99,95	918.749.000,00
Gedung Tempat Kerja-Taman				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan				
Gedung Tempat Kerja-	494.549.000,00	462.725.000,00	93,57	0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya				
Belanja Pemeliharaan				
Bangunan Gedung-Bangunan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
Gedung Tempat Tinggal- Flat/Rumah Susun				
Belanja Pemeliharaan Tugu				
Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.465.000,00
Jumlah	6.884.314.135,00	6.723.381.028,00	97,66	4.310.249.193,00

5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp285.488.000,00 atau 91,27% dari anggaran senilai Rp312.800.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp326.349.735,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	79.800.000,00	79.800.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan				
Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
Air Irigasi Lainnya				
Belanja Pemeliharaan Bangunan				
Air-Bangunan Pengaman				
Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan	0,00	0,00	0,00	104.436.000,00
Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam				
Belanja Pemeliharaan Bangunan				
Air-Bangunan Pengembangan				
Sumber Air dan Air Tanah-	68.500.000,00	68.389.000,00	99,84	68.310.000,00
Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air				

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.000.000,00	6.092.000,00	60,92	9.848.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	99.000.000,00	76.119.000,00	76,89	32.764.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	40.000.000,00	39.588.000,00	98,97	37.620.000,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	500.000,00	500.000,00	100,00	63.371.735,00
Jumlah	312.800.000,00	285.488.000,00	91,27	326.349.735,00

5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp482.400.000,00 atau 99,90% dari anggaran senilai Rp482.900.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp36.574.933.905,00 atau 85,25% dari anggaran senilai Rp42.902.447.695,00 Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp33.912.019.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.716.972.695,00	36.507.402.917,00	85,46	33.912.019.243,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	185.475.000,00	67.530.988,00	36,41	0,00
Jumlah	42.902.447.695,00	36.574.933.905,00	85,25	33.912.019.243,00

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp36.507.402.917,00 atau 85,46% dari anggaran senilai Rp42.716.972.695,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp33.912.019.243,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.585.246.695,00	26.689.040.221,00	87,26	25.576.217.540,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	74.828.000,00	19.600.000,00	26,19	11.050.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.968.588.000,00	9.135.414.186,00	83,29	7.007.497.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	770.518.000,00	499.475.000,00	64,82	1.125.005.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	317.792.000,00	163.873.510,00	51,57	192.249.703,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	42.716.972.695,00	36.507.402.917,00	85,46	33.912.019.243,00

5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp67.530.988,00 atau 36,41% dari anggaran senilai Rp185.475.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp3.616.490.165,00 atau 81,53% dari anggaran senilai Rp4.435.751.513,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.504.606.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.402.907.000,00	2.179.471.000,00	90,70	1.548.841.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.032.844.513,00	1.437.019.165,00	70,69	2.955.765.400,00
Jumlah	4.435.751.513,00	3.616.490.165,00	81,53	4.504.606.400,00

5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.179.471.000,00 atau 90,70% dari anggaran senilai Rp2.402.907.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.548.841.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.018.507.000,00	1.808.671.000,00	89,60	1.061.741.000,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	369.400.000,00	369.400.000,00	100,00	364.100.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	15.000.000,00	1.400.000,00	9,33	3.000.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
Jumlah	2.402.907.000,00	2.179.471.000,00	90,70	1.548.841.000,00

5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp1.437.019.165,00 atau 70,69% dari anggaran senilai Rp2.032.844.513,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.955.765.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.823.284.513,00	1.284.709.165,00	70,46	2.921.565.400,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	209.560.000,00	152.310.000,00	72,68	34.200.000,00
Jumlah	2.032.844.513,00	1.437.019.165,00	70,69	2.955.765.400,00

5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp42.604.999.381,93 atau 89,18% dari anggaran senilai Rp47.775.287.064,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp41.988.173.720,00

5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp200.400.041.853,14 atau 136,38% dari anggaran senilai Rp146.942.054.739,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp183.937.307.278,05.

5.1.03 Belanja Bunga

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bunga TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bunga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2022, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	279.763.272,00

5.1.05 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan, Belanja Hibah Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp85.182.145.969,00 dan atau 93,27% dari anggaran senilai Rp91.330.525.847,00 Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp62.881.075.691,00 dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
• Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
• Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	94.050.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00	100,00	3.175.000.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.576.420.000,00	23.631.177.600,00	88,92	15.370.008.000,00
• Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.732.420.127,00	36.177.667.000,00	91,05	30.457.187.189,00
• Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	243.000.000,00	208.500.000,00	85,80	0,00
Belanja Hibah Dana BOS				
• Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.967.540.000,00	11.353.655.649,00	103,52	10.178.684.782,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
• Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720,00	1.006.145.720,00	100,00	1.006.145.720,00
Jumlah	91.330.525.847,00	85.182.145.969,00	93,27	62.881.075.691,00

Penjelasan:

- Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - Direalisasikan hibah kepada KPU dan Bawaslu guna Kegiatan Pemilu Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan surat Mendagri Nomor: 900.1.9.1/435/SJ tanggal 24 Januari 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan pemberian hibah kepada:
 - Pada tahun 2023 hibah kepada Pemerintah pusat diberikan kepada Instansi Vertikal KPU dan Bawaslu berupa hibah uang yang dipergunakan pemilukada tahun 2024 yang pendanaannya di mulai tahun 2023 yang pemberian hibahnya didasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 1152/XII/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Dana Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Walikota mataram dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.
 - Pada tahun 2022 Hibah Kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada KPU sebesar Rp. 100.000.000,00 dan
- Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya merupakan pemberian hibah kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2023 tidak menganggarkan hibah kepada pemerintah daerah lainnya.

4. Pemberian Hibah kepada BUMN merupakan pemberian hibah pada tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Mataram tidak menganggarkan hibah kepada BUMN.
5. Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah dan swasta Kota Mataram selama TA 2023 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
6. Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor 280/IV/2022 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Periode Tahun 2019-2024 untuk tahun 2022 dan Keputusan Walikota Mataram Nomor 139/II/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram Periode Tahun 2019-2024 untuk tahun 2023 yang memperoleh suara di DPRD Kota Mataram TA. 2022 dan TA. 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Partai Politik	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Partai Golongan Karya (Golkar)	165.260.540,00	165.260.540,00	100,00	165.260.540,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	75.736.280,00	75.736.280,00	100,00	75.736.280,00
Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	58.497.900,00	58.497.900,00	100,00	58.497.900,00
Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)	33.936.500,00	33.936.500,00	100,00	33.936.500,00
Partai Amanah Nasional (PAN)	73.743.220,00	73.743.220,00	100,00	73.743.220,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	147.186.800,00	147.186.800,00	100,00	147.186.800,00
Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDI-P)	107.706.960,00	107.706.960,00	100,00	107.706.960,00
Partai Berkarya	51.206.660,00	51.206.660,00	100,00	51.206.660,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	72.898.780,00	72.898.780,00	100,00	72.898.780,00
Partai Demokrat	85.370.160,00	85.370.160,00	100,00	85.370.160,00
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	31.171.640,00	31.171.640,00	100,00	31.171.640,00
Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)	103.430.280,00	103.430.280,00	100,00	103.430.280,00
Jumlah	1.006.145.720,00	1.006.145.720,00	100,00	1.006.145.720,00

1. Pemberian Hibah Dana BOSP merupakan pemberian hibah kepada:
 - a. Satuan pendidikan dasar, dan/atau menengah selama TA 2023 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
 - b. Satuan pendidikan PAUD selama TA 2023 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

- 63 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- c. Satuan pendidikan kesetaraan selama TA 2023 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- g)

5.1.05.01 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp10.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp10.000.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.694.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.600.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	94.050.000,00
Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	2.694.050.000,00

5.1.05.05 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp62.822.344.600,00 atau 90,58% dari anggaran senilai Rp69.356.840.127,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp49.002.195.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.805.000.000,00	2.805.000.000,00	100,00	3.175.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.576.420.000,00	23.631.177.600,00	88,92	15.370.008.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	39.732.420.127,00	36.177.667.000,00	91,05	30.457.187.189,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	243.000.000,00	208.500.000,00	85,80	0,00
Jumlah	69.356.840.127,00	62.822.344.600,00	90,58	49.002.195.189,00

5.1.05.05.01 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp2.805.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp2.805.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.175.000.000,00.

5.1.05.05.02 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp23.631.177.600,00 atau 88,92% dari anggaran senilai Rp26.576.420.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp15.370.008.000,00.

5.1.05.05.03 Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp36.177.667.000,00 atau 91,05% dari anggaran senilai Rp39.732.420.127,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp30.457.187.189,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	38.753.001.127,00	35.250.200.000,00	90,96	30.182.787.189,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	979.419.000,00	927.467.000,00	94,70	274.400.000,00
Jumlah	39.732.420.127,00	36.177.667.000,00	91,05	30.457.187.189,00

5.1.05.05.05 Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp208.500.000,00 atau 85,80% dari anggaran senilai Rp243.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.05.06 Belanja Hibah Dana Bos

Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp11.353.655.649,00 atau 103,52% dari anggaran senilai Rp10.967.540.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp10.178.684.782,00.

5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp1.006.145.720,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp1.006.145.720,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.006.145.720,00.

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 direalisasikan senilai

Rp24.306.436.849,00 atau 92,10% dari anggaran senilai Rp26.391.230.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp16.570.993.525,00 dengan rincian sebagai berikut: sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023		Tahun 2022	
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.259.060.000,00	10.401.780.000,00	92,39	4.594.220.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	573.000.000,00	573.000.000,00	100,00	4.165.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	12.500.620.000,00	11.296.680.000,00	90,37	5.368.620.000,00
• Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.058.550.000,00	2.034.976.849,00	98,85	2.312.653.525,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
• Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	130.500.000,00
Jumlah	26.391.230.000,00	24.306.436.849,00	92,10	16.570.993.525,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya adalah di tahun 2023 dianggarkan sesuai usulan yang masuk sehingga anggaran 2023 lebih besar dari Tahun 2022 jadi realisasi 2023 lebih tinggi dari 2022 dan juga diSK-kan sesuai dengan yang dianggarkan.
2. Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun 2023 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp10.401.780.000,00 atau 92,39% dari anggaran senilai Rp11.259.060.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.594.220.000,00.

5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Tahun 2023 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp573.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp573.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.165.000.000,00.

5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2023 berupa uang yang direalisasikan senilai Rp13.331.656.849,00 atau 91,57% dari anggaran senilai Rp14.559.170.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.681.273.525,00

5.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Realisasi Belanja Modal untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp281.979.453.862,00 atau 91,49% dari anggaran senilai Rp308.214.060.513,00. Dari realisasi Belanja Modal tersebut sudah termasuk Belanja Modal dari BLUD yang dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp12.515.925.842,00, dari Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar Negeri lingkup Kota Mataram senilai Rp9.572.625.836,00 dan dari Dana JKN pada Puskesmas lingkup Kota Mataram senilai Rp1.532.831.338,00 yang dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Rincian Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal - Tanah	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91	11.374.815.258,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62	48.269.561.084,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02	45.384.593.358,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38	65.770.745.466,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95	3.206.146.629,00
Belanja Modal - Aset Lainnya	50.000.000,00	48.840.000,00	97,68	0,00
Jumlah	308.214.060.513,00	281.979.453.862,00	91,49	174.005.861.795,00

Penjelasan:

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

5.2.01 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Belanja Modal Tanah Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp20.305.698.726,00 atau 95,91% dari anggaran senilai Rp21.171.820.492,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11.374.815.258,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Persil	13.259.210.584,00	12.882.060.160,00	97,16	4.740.508.700,00
Belanja Modal Tanah Non Persil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lapangan	7.912.609.908,00	7.423.638.566,00	93,82	6.634.306.558,00
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	21.171.820.492,00	20.305.698.726,00	95,91	11.374.815.258,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kesalahan penganggaran dan
 - b. Dikarenakan dokumen sertifikat tanah tidak lengkap

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil

Belanja Modal Tanah Persil Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp12.882.060.160,00 atau 97,16% dari anggaran senilai Rp13.259.210.584,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.740.508.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	12.909.210.584,00	12.882.060.160,00	99,79	4.740.068.700,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	350.000.000,00	0,00	0,00	220.000,00
Jumlah	13.259.210.584,00	12.882.060.160,00	97,16	4.740.508.700,00

Terhadap Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp12.882.060.160,00 terdapat Modal Pembayaran Hutang Tanah Sebesar Rp11.000.000.000,00.

5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan

Belanja Modal Lapangan Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.423.638.566,00 atau 93,82% dari anggaran senilai Rp7.912.609.908,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.634.306.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	2.627.459.908,00	2.526.690.086,00	96,16	4.149.992.058,00
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	53.400.000,00	53.400.000,00	100,00	201.030.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Makam	5.209.750.000,00	4.828.889.000,00	92,69	1.318.868.500,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah untuk Taman	22.000.000,00	14.659.480,00	66,63	964.416.000,00
Jumlah	7.912.609.908,00	7.423.638.566,00	93,82	6.634.306.558,00

5.2.02 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp115.171.860.211,00 atau 93,62% dari anggaran senilai Rp123.014.933.652,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp48.269.561.084,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar	7.384.127.728,00	7.122.075.750,00	96,45	2.826.339.678,00
Belanja Modal Alat Angkutan	7.943.833.499,00	7.764.002.862,00	97,74	6.452.578.319,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	349.323.000,00	267.407.685,00	76,55	1.189.839.272,00
Belanja Modal Alat Pertanian	298.577.250,00	148.527.000,00	49,74	215.545.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.553.758.465,00	11.548.628.257,00	99,96	11.516.761.954,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.169.621.980,00	1.027.058.364,00	87,81	1.086.796.884,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	77.288.323.814,00	74.181.479.858,00	95,98	8.296.105.504,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	6.322.266.616,00	4.531.750.330,00	71,68	5.482.845.313,00
Belanja Modal Komputer	8.588.861.500,00	6.456.701.354,00	75,18	8.981.651.626,00
Belanja Modal Alat Eksplorasi	1.050.000,00	0,00	0,00	326.103.150,00
Belanja Modal Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	50.000.000,00
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	320.129.000,00	319.348.000,00	99,76	12.900.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	74.530.000,00	72.704.000,00	97,55	5.730.000,00
Belanja Modal Alat Peraga	0,00	4.055.750,00	0,00	20.500.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.565.530.800,00	1.559.321.000,00	99,60	1.762.214.384,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	5.000.000,00	18.950.001,00	379,00	43.650.000,00
Jumlah	123.014.933.652,00	115.171.860.211,00	93,62	48.269.561.084,00

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.122.075.750,00 atau 96,45% dari anggaran senilai Rp7.384.127.728,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.826.339.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Besar Darat	6.386.500.000,00	6.375.499.625,00	99,83	2.244.709.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	997.627.728,00	746.576.125,00	74,84	581.630.678,00
Jumlah	7.384.127.728,00	7.122.075.750,00	96,45	2.826.339.678,00

5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar Darat Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp6.375.499.625,00 atau 99,83% dari anggaran senilai Rp6.386.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.244.709.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Excavator	4.628.000.000,00	4.627.999.625,00	100,00	0,00
Belanja Modal Mesin Proses	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00	292.443.000,00
Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.750.000.000,00	1.739.000.000,00	99,37	1.952.266.000,00
Jumlah	6.386.500.000,00	6.375.499.625,00	99,83	2.244.709.000,00

5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp746.576.125,00 atau 74,84% dari anggaran senilai Rp997.627.728,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp581.630.678,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Compressor	0,00	0,00	0,00	3.370.000,00
Belanja Modal Pompa	472.127.728,00	257.063.625,00	54,45	94.485.678,00
Belanja Modal Mesin Bor	10.000.000,00	9.941.500,00	99,42	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	400.000.000,00	379.900.000,00	94,98	0,00
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	115.500.000,00	99.671.000,00	86,30	483.775.000,00
Jumlah	997.627.728,00	746.576.125,00	74,84	581.630.678,00

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.764.002.862,00 atau 97,74% dari anggaran senilai Rp7.943.833.499,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.452.578.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.916.883.499,00	7.764.002.862,00	98,07	6.452.578.319,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	7.943.833.499,00	7.764.002.862,00	97,74	6.452.578.319,00

5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.764.002.862,00 atau 98,07% dari anggaran senilai Rp7.916.883.499,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.452.578.319,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.761.000.000,00	2.702.916.003,00	97,90	1.520.656.452,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	617.980.000,00	583.800.000,00	94,47	477.725.350,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	174.900.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	686.270.000,00	639.806.859,00	93,23	987.392.517,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.248.199.499,00	1.244.580.000,00	99,71	286.005.000,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.900.000.000,00	1.889.500.000,00	99,45	317.000.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	703.434.000,00	703.400.000,00	100,00	2.688.899.000,00
Jumlah	7.916.883.499,00	7.764.002.862,00	98,07	6.452.578.319,00

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp267.407.685,00 atau 76,55% dari anggaran senilai Rp349.323.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.189.839.272,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	174.950.000,00	169.300.000,00	96,77	50.387.425,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	25.773.000,00	7.368.000,00	28,59	42.006.250,00
Belanja Modal Alat Ukur	148.600.000,00	90.739.685,00	61,06	1.097.445.597,00
Jumlah	349.323.000,00	267.407.685,00	76,55	1.189.839.272,00

5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp169.300.000,00 atau 96,77% dari anggaran senilai Rp174.950.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.387.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	1.200.000,00	600.000,00	50,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	166.750.000,00	165.700.000,00	99,37	46.887.425,00
Belanja Modal Peralatan Las	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	174.950.000,00	169.300.000,00	96,77	50.387.425,00

5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin

Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp7.368.000,00 atau 28,59% dari anggaran senilai Rp25.773.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42.006.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00
Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	0,00	0,00	0,00	40.031.250,00
Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	25.623.000,00	7.368.000,00	28,76	0,00
Jumlah	25.773.000,00	7.368.000,00	28,59	42.006.250,00

5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur

Belanja Modal Alat Ukur Tahun 2023 yang direalisasikan senilai Rp90.739.685,00 atau 61,06% dari anggaran senilai Rp148.600.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.097.445.597,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	9.957.500,00
Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	3.500.000,00	1.969.325,00	56,27	28.270.597,00
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.059.217.500,00
Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	143.000.000,00	86.670.360,00	60,61	0,00
Jumlah	148.600.000,00	90.739.685,00	61,06	1.097.445.597,00

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian berupa Alat Pengolahan pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp148.527.000,00 atau 49,74% dari anggaran senilai Rp298.577.250,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp215.545.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	150.000.000,00	0,00	0,00	169.750.000,00
Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	148.577.250,00	148.527.000,00	99,97	45.795.000,00
Jumlah	298.577.250,00	148.527.000,00	49,74	215.545.000,00

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp11.548.628.257,00 atau 99,96% dari anggaran senilai Rp11.553.758.465,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp11.516.761.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	2.330.300.093,00	2.974.732.373,00	127,65	4.050.325.537,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.752.184.935,00	7.571.167.718,00	97,66	6.826.696.180,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.471.273.437,00	1.002.728.166,00	68,15	639.740.237,00
Jumlah	11.553.758.465,00	11.548.628.257,00	99,96	11.516.761.954,00

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.974.732.373,00 atau 127,65% dari anggaran senilai Rp2.330.300.093,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.050.325.537,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	10.000.000,00	0,00	16.400.000,00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	30.000.000,00	26.470.000,00	88,23	0,00
Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	8.950.000,00	0,00	60.990.000,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	415.597.589,00	360.517.488,00	86,75	470.234.797,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.884.702.504,00	2.568.794.885,00	136,30	3.502.700.740,00
Jumlah	2.330.300.093,00	2.974.732.373,00	127,65	4.050.325.537,00

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya terealisasi sebesar Rp2.568.794.885,00 atau mengalami pelampauan hingga 136,30% dari anggaran sebesar Rp1.884.702.504,00 dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp7.571.167.718,00 atau 97,66% dari anggaran senilai Rp7.752.184.935,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.826.696.180,00 dengan rincian sebagai berikut:



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Mebel	4.514.218.471,00	4.893.766.537,00	108,41	4.182.471.344,00
Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0,00	4.395.000,00	0,00	14.077.946,00
Belanja Modal Alat Pembersih	32.200.000,00	86.644.800,00	269,08	138.382.053,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.379.990.023,00	1.129.347.471,00	81,84	1.115.770.715,00
Belanja Modal Alat Dapur	14.781.875,00	16.673.559,00	112,80	80.308.900,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.753.994.566,00	1.390.550.351,00	79,28	1.188.251.222,00
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	57.000.000,00	49.790.000,00	87,35	107.434.000,00
Jumlah	7.752.184.935,00	7.571.167.718,00	97,66	6.826.696.180,00

Belanja Modal Mebel Alat Pembersih, dan Alat Dapur mengalami pelampauan lebih dari total anggaran dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.002.728.166,00 atau 68,15% dari anggaran senilai Rp1.471.273.437,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp639.740.237,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	388.988.305,00	270.633.150,00	69,57	264.599.180,00
Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	220.227.000,00	200.750.000,00	91,16	120.642.800,00
Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	299.638.000,00	240.317.860,00	80,20	62.302.500,00
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	166.984.800,00	139.154.800,00	83,33	4.500.000,00
Belanja Modal Kursi Tamu di Ruang Pejabat	124.688.000,00	124.673.000,00	99,99	63.024.000,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	270.747.332,00	27.199.356,00	10,05	124.671.757,00
Jumlah	1.471.273.437,00	1.002.728.166,00	68,15	639.740.237,00

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.027.058.364,00 atau 87,81% dari anggaran senilai Rp1.169.621.980,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.086.796.884,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	1.027.541.980,00	926.518.364,00	90,17	889.573.067,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	22.500.000,00	21.000.000,00	93,33	193.663.817,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	119.000.000,00	78.960.000,00	66,35	3.560.000,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	580.000,00	580.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.169.621.980,00	1.027.058.364,00	87,81	1.086.796.884,00

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp926.518.364,00 atau 90,17% dari anggaran senilai Rp1.027.541.980,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp889.573.067,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	606.207.500,00	386.164.970,00	63,70	254.595.921,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	339.409.480,00	298.324.653,00	87,90	420.224.997,00
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	20.000.000,00	36.451.945,00	182,26	27.437.000,00
Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	144.016.797,00	0,00	87.427.350,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	61.925.000,00	61.559.999,00	99,41	99.887.799,00
Jumlah	1.027.541.980,00	926.518.364,00	90,17	889.573.067,00

5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi

Belanja Modal Alat Komunikasi pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp21.000.000,00 atau 93,33% dari anggaran senilai Rp22.500.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp193.663.817,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	22.500.000,00	21.000.000,00	93,33	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	173.663.817,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Jumlah	22.500.000,00	21.000.000,00	93,33	193.663.817,00

5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar

Belanja Modal Peralatan Pemancar pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp78.960.000,00 atau 66,35% dari anggaran senilai Rp119.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Switcher Antena	110.000.000,00	69.960.000,00	63,60	3.560.000,00
Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	119.000.000,00	78.960.000,00	66,35	3.560.000,00

5.2.02.06.04 Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi

Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp580.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp580.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp74.181.479.858,00 atau 95,98% dari anggaran senilai Rp77.288.323.814,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.296.105.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran	72.926.217.814,00	70.048.995.480,00	96,05	8.296.105.504,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	4.362.106.000,00	4.132.484.378,00	94,74	0,00
Jumlah	77.288.323.814,00	74.181.479.858,00	95,98	8.296.105.504,00

5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp70.048.995.480,00 atau 96,05% dari anggaran senilai Rp72.926.217.814,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.296.105.504,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.646.212.377,00	3.687.877.106,00	79,37	3.989.544.168,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	4.950.000,00	0,00	0,00	12.666.600,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	10.982.958.240,00	10.405.704.634,00	94,74	450.000,00



Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	4.000.000.000,00	3.970.500.000,00	99,26	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran THT	2.470.414.754,00	2.417.040.000,00	97,84	1.350.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	5.082.661.000,00	5.081.791.930,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	1.000.000.000,00	996.000.000,00	99,60	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	237.670.000,00	67.230.000,00	28,29	0,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	922.506.720,00	921.500.000,00	99,89	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	26.948.527.844,00	26.947.877.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	2.455.600.000,00	2.455.600.000,00	100,00	2.600.000.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	2.896.773.000,00	2.896.773.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0,00	0,00	0,00	1.646.500.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	207.450.000,00	0,00	0,00	28.600.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	1.214.550.000,00	1.144.970.000,00	94,27	0,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	9.855.943.879,00	9.056.131.810,00	91,88	16.994.736,00
Jumlah	72.926.217.814,00	70.048.995.480,00	96,05	8.296.105.504,00

5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.132.484.378,00 atau 94,74% dari anggaran senilai Rp4.362.106.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.531.750.330,00 atau 71,68% dari anggaran senilai Rp6.322.266.616,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.482.845.313,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.356.879.600,00	482.200.872,00	20,46	255.910.372,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.646.322.592,00	1.740.549.458,00	105,72	5.226.934.941,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.309.064.424,00	2.299.000.000,00	99,56	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.322.266.616,00	4.531.750.330,00	71,68	5.482.845.313,00

5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp482.200.872,00 atau 20,46% dari anggaran senilai Rp2.356.879.600,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp255.910.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.005.000.000,00	242.778.500,00	12,11	5.424.570,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	242.786.970,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	351.879.600,00	239.422.372,00	68,04	2.498.832,00
Jumlah	2.356.879.600,00	482.200.872,00	20,46	255.910.372,00

5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.740.549.458,00 atau 105,72% dari anggaran senilai Rp1.646.322.592,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.226.934.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	0,00	3.200.000,00	0,00	4.356.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0,00	2.395.000,00	0,00	6.858.460,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	0,00	4.118.353,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	0,00	1.120.060,00	0,00	7.603.550,00
Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0,00	3.600.000,00	0,00	685.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	0,00	48.177.000,00	0,00	51.152.526,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	263.538,00	249.900,00	94,83	124.500.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.646.059.054,00	1.677.689.145,00	101,92	5.023.129.405,00
Jumlah	1.646.322.592,00	1.740.549.458,00	105,72	5.226.934.941,00

5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika

Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp2.299.000.000,00 atau 99,56% dari anggaran senilai Rp2.309.064.424,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.08.08 Belanja Modal Alat Laboratorium Hydrodinamica

Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp10.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran senilai Rp10.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp6.456.701.354,00 atau 75,18% dari anggaran senilai Rp8.588.861.500,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp8.981.651.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	6.945.200.500,00	4.689.168.672,00	67,52	6.352.836.325,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.643.661.000,00	1.767.532.682,00	107,54	2.628.815.301,00
Jumlah	8.588.861.500,00	6.456.701.354,00	75,18	8.981.651.626,00

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.689.168.672,00 atau 67,52% dari anggaran senilai Rp6.945.200.500,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.352.836.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Jaringan	65.000.000,00	343.723.750,00	528,81	355.787.465,00
Belanja Modal Personal Computer	5.537.908.500,00	3.484.304.402,00	62,92	4.521.156.560,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.342.292.000,00	861.140.520,00	64,15	1.475.892.300,00
Jumlah	6.945.200.500,00	4.689.168.672,00	67,52	6.352.836.325,00

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.767.532.682,00 atau 107,54% dari anggaran senilai Rp1.643.661.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.628.815.301,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Mainframe	6.660.000,00	6.000.000,00	90,09	3.730.000,00
Belanja Modal Peralatan Mini Computer	5.475.000,00	10.752.000,00	196,38	20.100.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	646.230.400,00	375.286.999,00	58,07	792.643.897,00
Belanja Modal Peralatan Jaringan	165.402.100,00	151.836.820,00	91,80	352.739.057,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	819.893.500,00	1.223.656.863,00	149,25	1.459.602.347,00
Jumlah	1.643.661.000,00	1.767.532.682,00	107,54	2.628.815.301,00

Belanja Modal Peralatan Mini Computer dan Peralatan Komputer Lainnya mengalami pelampauan lebih dari total anggaran dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp149.850.000,00 atau 99,90% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Sumur	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	0,00
Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
Jumlah	150.000.000,00	149.850.000,00	99,90	50.000.000,00

5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur

Belanja Modal Sumur pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp149.850.000,00 atau 99,90% dari anggaran senilai Rp150.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.02.14 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi pada Tahun 2023 merupakan Belanja Modal Alat Bantu Produksi yang terealisasi senilai Rp319.348.000,00 atau 99,76% dari anggaran senilai Rp320.129.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp12.900.000,00.

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp72.704.000,00 atau 97,55% dari anggaran senilai Rp74.530.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp5.730.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Pelindung	39.830.000,00	39.004.000,00	97,93	0,00
Belanja Modal Alat SAR	34.700.000,00	33.700.000,00	97,12	5.730.000,00
Jumlah	74.530.000,00	72.704.000,00	97,55	5.730.000,00

5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga

Belanja Modal Alat Peraga pada Tahun 2023 berupa Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan terealisasi senilai Rp4.055.750,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp20.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0,00	4.055.750,00	0,00	3.500.000,00
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Jumlah	0,00	4.055.750,00	0,00	20.500.000,00

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-Rambu pada Tahun 2023 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat terealisasi senilai Rp1.559.321.000,00 atau 99,60% dari anggaran senilai Rp1.565.530.800,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp1.762.214.384,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Rambu Bersuar	1.493.500.000,00	1.490.100.000,00	99,77	1.430.026.384,00
Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	72.030.800,00	69.221.000,00	96,10	24.092.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	308.096.000,00
Jumlah	1.565.530.800,00	1.559.321.000,00	99,60	1.762.214.384,00

5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga pada Tahun 2023 terealisasi senilai Rp18.950.001,00 atau 379,00% dari anggaran senilai Rp5.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp43.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0,00	5.120.001,00	0,00	11.950.000,00
Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	8.830.000,00	0,00	3.800.000,00
Belanja Modal Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.000.000,00	18.950.001,00	379,00	43.650.000,00

Belanja Modal Peralatan Olahraga mengalami pelampauan lebih dari total anggaran dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp68.940.565.477,00 atau 78,02% dari anggaran senilai Rp88.359.316.456,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp45.384.593.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	84.724.296.456,00	65.543.615.477,00	77,36	43.299.499.358,00
Belanja Modal Monumen	4.000.000,00	3.800.000,00	95,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.631.020.000,00	3.393.150.000,00	93,45	2.085.094.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	88.359.316.456,00	68.940.565.477,00	78,02	45.384.593.358,00

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp65.543.615.477,00 atau 77,36% dari anggaran senilai Rp84.724.296.456,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp43.299.499.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	83.351.820.456,00	64.308.247.829,00	77,15	42.641.153.358,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.372.476.000,00	1.235.367.648,00	90,01	658.346.000,00
Jumlah	84.724.296.456,00	65.543.615.477,00	77,36	43.299.499.358,00

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp64.308.247.829,00 atau 77,15% dari anggaran senilai Rp83.351.820.456,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp42.641.153.358,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.341.736.000,00	7.508.824.619,00	80,38	12.542.679.441,00
Belanja Modal Bangunan Gudang	80.550.000,00	5.498.000,00	6,83	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	1.587.500.000,00	647.500.000,00	40,79	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	932.581.000,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	9.906.239.096,00	5.083.380.864,00	51,31	5.124.486.391,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	409.000.000,00	400.584.000,00	97,94	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	464.000.000,00	462.750.150,00	99,73	278.653.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	12.582.151.200,00	11.373.122.600,00	90,39	6.905.178.380,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	315.534.300,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.019.250.000,00	3.704.644.000,00	92,17	3.973.097.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.550.000,00	80.386.000,00	99,80	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	770.000.000,00	688.069.000,00	89,36	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.500.000.000,00	10.393.414.666,00	98,98	454.341.000,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.703.950.000,00	2.647.035.000,00	97,90	2.309.336.000,00
Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	208.250.000,00	2.250.000,00	1,08	0,00

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.878.879.000,00	5.819.653.150,00	65,54	191.889.000,00
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	12.557.396.160,00	7.191.586.950,00	57,27	4.287.040.938,00
Belanja Modal Bangunan Parkir	1.128.800.000,00	328.054.000,00	29,06	0,00
Belanja Modal Taman	7.712.319.000,00	7.630.174.830,00	98,93	4.806.083.750,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	421.250.000,00	341.320.000,00	81,03	520.253.158,00
Jumlah	83.351.820.456,00	64.308.247.829,00	77,15	42.641.153.358,00

5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp1.235.367.648,00 atau 90,01% dari anggaran senilai Rp1.372.476.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp658.346.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	598.471.000,00
Belanja Modal Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00	59.875.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.372.476.000,00	1.235.367.648,00	90,01	0,00
Jumlah	1.372.476.000,00	1.235.367.648,00	90,01	658.346.000,00

5.2.03.02 Belanja Modal Monumen

Belanja Modal Monumen pada Tahun 2023 berupa Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti terealisasi senilai Rp3.800.000,00 atau 95,00% dari anggaran senilai Rp4.000.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00.

5.2.03.04 Belanja Modal Tugu titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2023 berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas terealisasi senilai Rp3.393.150.000,00 atau 93,45% dari anggaran senilai Rp3.631.020.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.085.094.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.847.500.000,00	1.670.438.000,00	90,42	98.580.000,00
Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	162.500.000,00	161.599.000,00	99,45	0,00
Belanja Modal Pagar	1.471.020.000,00	1.412.113.000,00	96,00	0,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	150.000.000,00	149.000.000,00	99,33	1.986.514.000,00
Jumlah	3.631.020.000,00	3.393.150.000,00	93,45	2.085.094.000,00

5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp71.240.765.500,00 atau 97,38% dari anggaran senilai Rp73.158.004.913,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp65.770.745.466,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	48.566.987.800,00	47.069.470.700,00	96,92	50.653.932.995,00
Belanja Modal Bangunan Air	15.005.497.113,00	14.963.683.900,00	99,72	7.234.405.600,00
Belanja Modal Instalasi	318.860.000,00	156.746.000,00	49,16	954.758.217,00
Belanja Modal Jaringan	9.266.660.000,00	9.050.864.900,00	97,67	6.927.648.654,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	73.158.004.913,00	71.240.765.500,00	97,38	65.770.745.466,00

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp47.069.470.700,00 atau 96,92% dari anggaran senilai Rp48.566.987.800,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.653.932.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan	47.623.014.800,00	46.225.994.250,00	97,07	50.314.000.995,00
Belanja Modal Jembatan	943.973.000,00	843.476.450,00	89,35	339.932.000,00
Jumlah	48.566.987.800,00	47.069.470.700,00	96,92	50.653.932.995,00

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp46.225.994.250,00 atau 97,07% dari anggaran senilai Rp47.623.014.800,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp50.314.000.995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan Kota	10.571.394.800,00	10.221.116.250,00	96,69	18.829.157.245,00
Belanja Modal Jalan Desa	35.442.470.000,00	35.357.599.000,00	99,76	30.942.776.750,00
Belanja Modal Jalan Khusus	960.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan Lainnya	649.150.000,00	647.279.000,00	99,71	542.067.000,00
Jumlah	47.623.014.800,00	46.225.994.250,00	97,07	50.314.000.995,00

5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Jembatan Tahun 2023 merupakan Belanja Modal Jembatan direalisasikan senilai Rp843.476.450,00 atau 89,35% dari anggaran senilai Rp943.973.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp339.932.000,00.

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp14.963.683.900,00 atau 99,72% dari anggaran senilai Rp15.005.497.113,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp7.234.405.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	1.397.095.920,00	1.389.655.000,00	99,47	591.132.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	13.443.861.193,00	13.416.871.000,00	99,80	6.639.203.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	9.510.900,00	0,00	4.070.600,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	164.540.000,00	147.647.000,00	89,73	0,00
Jumlah	15.005.497.113,00	14.963.683.900,00	99,72	7.234.405.600,00

5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Tahun 2023 berupa Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi direalisasikan senilai Rp1.389.655.000,00 atau 99,47% dari anggaran senilai Rp1.397.095.920,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp591.132.000,00

5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam

Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp13.416.871.000,00 atau 99,80% dari anggaran senilai Rp13.443.861.193,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.639.203.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	2.869.063.000,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	8.020.885.980,00	8.004.207.000,00	99,79	3.770.140.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	5.422.975.213,00	5.412.664.000,00	99,81	0,00
Jumlah	13.443.861.193,00	13.416.871.000,00	99,80	6.639.203.000,00

5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku

Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Tahun 2023 merupakan Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku direalisasikan senilai Rp9.510.900,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp4.070.600,00.

5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp147.647.000,00 atau 89,73% dari anggaran senilai Rp164.540.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	15.540.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	149.000.000,00	147.647.000,00	99,09	0,00
Jumlah	164.540.000,00	147.647.000,00	89,73	0,00

5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp156.746.000,00 atau 49,16% dari anggaran senilai Rp318.860.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp954.758.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	57.500.000,00	46.746.000,00	81,30	45.967.217,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	111.360.000,00	110.000.000,00	98,78	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	237.626.000,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	671.165.000,00
Jumlah	318.860.000,00	156.746.000,00	49,16	954.758.217,00

5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan Tahun 2023 berupa Belanja Modal Jaringan Listrik direalisasikan senilai Rp9.050.864.900,00 atau 97,67% dari anggaran senilai Rp9.266.660.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp6.927.648.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jaringan Transmisi	9.004.660.000,00	8.974.248.000,00	99,66	6.716.857.000,00
Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	0,00	0,00	158.544.154,00
Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	262.000.000,00	76.616.900,00	29,24	52.247.500,00
Jumlah	9.266.660.000,00	9.050.864.900,00	97,67	6.927.648.654,00

5.2.05 Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp6.271.723.948,00 atau 254,95% dari anggaran senilai Rp2.459.985.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp3.206.146.629,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	951.150.000,00	4.733.805.971,00	497,69	2.874.790.953,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	26.160.000,00	105.663.477,00	403,91	95.643.676,00
Belanja Modal Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Biota Perairan	3.175.000,00	3.175.000,00	100,00	43.900.000,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	1.252.500.000,00	1.239.073.000,00	98,93	149.812.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud* (Salah dr BAS 1317)	227.000.000,00	190.006.500,00	83,70	42.000.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	2.459.985.000,00	6.271.723.948,00	254,95	3.206.146.629,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami pelampauan hingga 254,95% dikarenakan Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS Satdikdas Negeri yang tidak dianggarkan. Hal ini akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran selanjutnya.

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp4.733.805.971,00 atau 497,69% dari anggaran senilai Rp951.150.000,00. Sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.874.790.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	858.000.000,00	4.525.765.571,00	527,48	2.730.924.139,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	93.150.000,00	208.040.400,00	223,34	136.698.749,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	7.168.065,00